

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab IV ini, akan dikemukakan hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian merupakan gambaran konstruksi pendidikan politik pada Sekolah Menengah Atas di Kota Pangkalpinang berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara serta dokumentasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Sedangkan pembahasan merupakan diskusi yang dibatasi pada hasil temuan empiris di lapangan dengan kajian teoritis. Konstruktivisme adalah landasan berfikir (filosofi) pembelajaran kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata.

Jadi, pada penelitian ini konstruksi pendidikan politik adalah bagaimana peneliti memaknai serta menggambarkan pendidikan politik berdasarkan pengalaman yang terjadi pada lapangan. Dalam persekolahan, tidak hanya memindahkan pengetahuan guru kepada siswa, tetapi bagaimana siswa tersebut dapat memaknai pengetahuan tersebut berdasarkan pengalaman nyata mereka di sekolah melalui berbagai metode yang diberikan oleh guru.

Pembahasan dimaksudkan untuk mengungkapkan esensi makna yang tersirat dalam akumulasi data secara komprehensif dengan cara membandingkan temuan empiris dengan teori yang relevan. Hasilnya diharapkan dapat

memberikan masukan untuk para guru dan siswa dalam memaknai dan menggambarkan pendidikan politik pada dunia persekolahan, khususnya Sekolah Menengah Atas dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan pada kajian Pendidikan Kewarganegaraan.

## **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

### **1. SMA Negeri 1 Pangkalpinang**

Jika dikaitkan dengan kajian penelitian, SMA Negeri 1 Pangkalpinang memiliki misi dan tujuan yang menunjang terbentuknya penanaman nilai-nilai karakter siswa untuk membentuk watak warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagai tujuan dari pendidikan politik. Misi dan tujuannya antara lain:

#### **Misi**

Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi, maka SMA Negeri 1 Pangkalpinang, memiliki misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan perilaku Pancasila.
2. Mengembangkan pelayanan pendidikan yang profesional.
3. Mengembangkan potensi peserta didik.
4. Mengembangkan semangat kompetensi.
5. Mengembangkan iptek, imtaq, dan seni.
6. Mengembangkan sikap jujur dan bersih; santun dan cerdas; bertanggung jawab dan kerja keras; disiplin dan kreatif; peduli dan suka menolong.
7. Mengembangkan sikap budaya lingkungan dengan upaya

pelestarian fungsi lingkungan.

8. Mengembangkan sikap peduli lingkungan dengan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

### **Tujuan Sekolah**

Tujuan yang ingin kami capai dengan dijadikannya sekolah kami sebagai Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional (RSBI) adalah sebagai berikut :

#### **a. Tujuan Umum**

Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, imtaq, akhlak mulia, memiliki keterampilan berbasis teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi secara mandiri untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut baik tingkat nasional maupun internasional serta berwawasan dan berbudaya lingkungan.

#### **b. Tujuan Khusus Sekolah**

- a) Mempersiapkan peserta didik agar setelah lulus menjadi manusia yang memiliki imtaq, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, jiwa kepemimpinan, mandiri, berwawasan kebangsaan dan kemasyarakatan saling menghargai dan menghormati serta hidup berkerukunan dalam kebhinekaan, baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

- b) Membekali peserta didik agar memiliki keterampilan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta mampu mengembangkan diri secara mandiri.
- c) Menanamkan sikap ulet, gigih dan sportivitas yang tinggi kepada peserta didik dalam kompetisi dan beradaptasi dengan lingkungan global.
- d) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menjadi manusia yang berkepribadian, cerdas, berkualitas, berprestasi dalam bidang akademik, olah raga dan seni serta melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- e) Memiliki kurikulum, silabus dan sistem penilaian dengan kriteria ketuntasan minimal ideal dan bertaraf internasional
- f) Memiliki standar minimal pelayanan pendidikan yang dilengkapi dengan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara internal, lokal, nasional, dan internasional.
- g) Memperoleh peserta didik yang memiliki kompetensi yang memadai baik akademik maupun nonakademik.
- h) Terselenggaranya proses belajar mengajar yang berkualitas
- i) Memperoleh peserta didik yang memiliki disiplin tinggi
- j) Meningkatkan perolehan NUAN secara signifikan
- k) Mempertahankan kelulusan 100%

- l) Meningkatkan kelulusan dalam penerimaan jalur undangan SNMPTN, PMDK, dan PMB pada PTN
- m) Mengembangkan penggunaan bahan ajar yang berorientasi pada olimpiade sains nasional pada setiap mata pelajaran
- n) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar
  - o) Mengembangkan perpustakaan dengan melaksanakan komputerisasi pada bidang penyimpanan data dan layanan administrasi
  - p) Menciptakan suasana belajar yang kondusif.
  - q) Menanamkan wawasan dan budaya peduli lingkungan.

Selain data di atas, SMA Negeri 1 Pangkalpinang memiliki organisasi yang bergerak secara aktif dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan politik yaitu organisasi OSIS. Selain organisasi OSIS, ada juga kegiatan – kegiatan yang dijalankan di sekolah ini antara lain berupa ekstrakurikuler-ekstrakurikuler yang dapat mendukung siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dalam bidang yang diminati. Hal ini bertujuan menanamkan nilai-nilai pendidikan politik kepada siswa. Kegiatan orasi OSIS dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh siswa untuk turun ke lapangan agar dapat mendengarkan secara langsung apa saja yang menjadi agenda OSIS untuk diketahui bersama dan apabila menemukan sebuah permasalahan dapat secara langsung diselesaikan secara musyawarah dengan seluruh anggota

sekolah, termasuk guru-guru. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya antara lain, LCC (Lomba Cerdas Cermat), Jurnalistik Rohis, Karya Ilmiah Remaja, olimpiade ekonomi, Palang Merah Indonesia (PMI), English Club, Japan Club, Pramuka, Tari tradisional, dll. Semua ekstrakurikuler ini diikuti kepada para siswa yang berminat ikut sesuai dengan kemauan dan kemampuan diri siswa masing-masing.

Kegiatan orasi OSIS adalah kegiatan dimana OSIS mengadakan diskusi terbuka guna menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk memecahkan masalah tertentu, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam suatu kegiatan pemilihan. Hal tersebut dapat membentuk siswa untuk menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam penggunaan hak dan kewajibannya melalui kegiatan sosialisasi ini. Kegiatan ini dilakukan secara insidental, yakni pada saat akan mengadakan suatu kegiatan.

Kegiatan LCC (Lomba Cerdas Cermat) dikhususkan pada lomba pemahaman UUD 1945 adalah kegiatan yang bertujuan untuk memahami Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya serta mengetahui tentang TAP MPR RI dan Substansinya, sehingga siswa menjadi lebih paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. dan dapat membagi pengetahuan yang telah didapat dalam kegiatan ini kepada siswa yang lain.

Selain itu, di sekolah ini terdapat kegiatan *coffee morning* yang dilakukan setiap hari senin sebagai kegiatan yang bertujuan membangun



kekeluargaan dalam lingkungan sekolah sebagai forum komunikasi siswa dan guru di SMA Negeri 1 Pangkalpinang. Forum guru dikhususkan untuk membahas kendala – kendala dalam kegiatan pembelajaran di sekolah yang dialami masing-masing guru dan menyelesaikan bersama-sama masalah-masalah yang dihadapi. Forum siswa dikhususkan untuk membahas apa saja yang menjadi kendala dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dan bagaimana memecahkan masalah tersebut secara terbuka dan kekeluargaan.

## **2. SMA Depati Amir Pangkalpinang**

Gambaran umum tentang SMA Depati Amir Pangkalpinang adalah sekolah ini memiliki lingkungan yang kurang mendukung untuk dilakukannya kegiatan-kegiatan aktivitas siswa untuk mengembangkan diri mereka, karena dalam sekolah ini organisasinya tidak berjalan dengan baik, sehingga tidak adanya kegiatan-kegiatan yang mendukung siswa untuk dapat berkreasi dan bergerak sesuai dengan bidang yang mereka minati. Tidak adanya kegiatan OSIS yang dilakukan di sekolah ini. Di sekolah ini hanya melakukan kegiatan belajar mengajar yang monoton setiap harinya. Tidak ada kegiatan ekstrakurikuler sebagai kegiatan yang dapat menjadikan siswa aktif dalam mengembangkan kepribadian diri mereka.

SMA Depati Amir Kota Pangkalpinang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi : Mewujudkan Lulusan Yang Bermutu, Berdasarkan IPTEK, Berwawasan IMTAQ dan Dapat Diterima oleh Masyarakat

Misi :

1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan yang efektif sehingga dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
2. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif keseluruhan warga sekolah.
3. Meningkatkan prestasi di bidang ekstrakurikuler sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Meningkatkan pembinaan ahlak yang mulia terhadap seluruh warga sekolah sesuai dengan tuntunan ajaran agama.
5. Menumbuh kembangkan penghayatan terhadap agama, sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak dan bertingkah laku.
6. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan terkait.

Namun pada kenyataannya, visi dan misi pada sekolah ini kurang berjalan dengan baik. Siswa sama sekali tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di persekolahan, seperti ekstrakurikuler-ekstrakurikuler. Tidak terlihat adanya kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk terciptanya siswa yang aktif dan partisipatif dalam lingkungan sekolah. Suasana sekolah yang kurang mendukung untuk belajar dengan baik, karena masih terdapat siswa-siswa yang sering



bolos dan di sekolah tidak ada satpam untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekolah.

### 3. Riwayat Informan

Di bawah ini akan dijabarkan riwayat informan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Riwayat Informan**

NO	NAMA	USIA	JABATAN	RIWAYAT ORGANISASI
1.	Desi Andriyani, S.Pd	29 tahun	Guru PKn	Tidak ada
2.	Dwi Wiwik NH, SH	31 tahun	Guru PKn	Pembimbing LCC (Lomba Cerdas Cermat) UUD 1945
3.	Dra. Hermiyati	33 tahun	Guru PKn	Tidak ada
4.	Marshinta, S.Pd	36 tahun	Guru PKn	Tidak ada
5.	Deka	17 tahun	Siswa	Ketua OSIS
6.	Fatia Medinah	16 tahun	Wakil ketua OSIS	Wakil Ketua OSIS
7.	Bunayya Shidqi Hanan	16 tahun	Ketua OSIS	Ketua OSIS
8.	Viola	16 tahun	Siswa	Anggota OSIS
9.	Fraya Livia Ulima	16 tahun	Siswa	Tidak ada
10.	Indah Pratama Putri	17 tahun	Siswa	Anggota OSIS
11.	Reza Rahman	16 tahun	Siswa	Tidak ada

12.	Ginta	17 tahun	Siswa	Anggota OSIS
13	Hery Haryono, S.Pd, MM	43 tahun	Kasi Kurikulum PSM Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang	Guru Matematika, di SMK THB, Pangkalpinang, Guru Teknik Mesin di SMK Negeri 2 Pangkalpinang

#### B. Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian ini merupakan rumusan dari seluruh sumber yang peneliti temukan dilapangan selama kegiatan penelitian berlangsung, yaitu hasil wawancara, hasil observasi partisipan dan non-partisipan, hasil pencatatan dokumen atau rekaman arsip dan perangkat fisik. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena (Hariwijaya. 2008: 22). Pembahasan dalam penelitian ini berupa ulasan-ulasan atau kajian-kajian hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori ataupun kajian-kajian hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang ada, dan bukan data yang terbatas pada angka. Penelitian kualitatif bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial (Lexi J. Moleong. 2002 : 3).

Strategi penelitian kualitatif fenomenologi ini terkatit pada hubungan atau relasi antara peneliti dengan individu-individu, baik antara hubungan tatap muka dengan orang lain yang dikenal langsung dan familiar

atau dengan relasi sosial yang bertipe lebih jauh. Schutz mengasumsikan hubungan yang pertama sebagai fondasi nyata kehidupan sosial pada umumnya. Relasi sosial autentik menyatakan ketimbal-balikan langsung kontak manusia (Ritzer & Smart, 2011: 483).

Teknik *purposive* dan *snowball* adalah teknik yang peneliti gunakan dalam melakukan wawancara terhadap 13 informan sebagai narasumber kunci yang berada di Sekolah Menengah Atas Kota Pangkalpinang.

#### **1. Makna Pendidikan Politik pada Sekolah Menengah Atas kota Pangkalpinang**

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwa makna dari pendidikan politik adalah proses mendidik siswa untuk berproses secara terus menerus, sehingga orang yang bersangkutan lebih mampu memahami dirinya sendiri dan situasi-kondisi lingkungan sekitarnya, dengan tujuan penanaman kesadaran politik bagi siswa. Hal ini sesuai dengan Pendidikan politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa sebagai upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik (Kartini K, 2009: 64). Pendidikan politik merupakan aktivitas pendidikan diri (mendidik dengan sengaja diri sendiri) yang terus menerus berproses di dalam person, sehingga orang yang bersangkutan lebih mampu memahami dirinya sendiri

dan situasi-kondisi lingkungan sekitarnya (Kartini K, 2009: 65). Dari pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa makna pendidikan politik adalah sosialisasi politik.

Selain itu, berdasarkan pengamatan peneliti sosialisasi politik dalam penelitian berarti mentransisikan nilai-nilai demokratis kepada siswa, baik dari guru maupun siswanya itu sendiri. Transisi nilai diwujudkan dalam beberapa sarana, antara lain sarana pembelajaran akademik dan sarana pembelajaran non akademik. Sarana pembelajaran akademik dilakukan pada kegiatan belajar mengajar di kelas dalam hal ini pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Melalui metode-metode serta media-media pembelajaran yang digunakan oleh guru pada saat kegiatan belajar berlangsung, digunakan metode seperti menirukan (*imitation*), dalam penelitian adalah dengan metode role playing, studi lapangan (pada kajian materi kebebasan pers, siswa ditugaskan oleh guru untuk terjun langsung pada kantor-kantor media massa) dan simulasi. Metode seperti ini bertujuan untuk siswa dapat mendapatkan langsung pengalaman mereka dan mereka dapat memaknai sendiri apa yang menjadi kajian materi yang diajarkan, sehingga mereka bisa lebih memahami makna dari sebuah kajian materi ketika mereka diberikan kebebasan untuk menggunakan partisipasi mereka dalam sebuah pembelajaran. Partisipasi dalam hal ini berjalan dengan dipengaruhi oleh faktor sosial yang melatarbelakangi diri siswa dalam melakukan aktivitas-aktivitas pada kajian yang dilakukan di lapangan. Partisipasi aktif siswa dalam hal ini merupakan proses sosialisasi politik,

yakni siswa melakukan interaksi dan reaksi terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam lingkungan sosial tersebut sesuai dengan kajian lapangan dalam materi dan mereka ikut berpartisipasi di dalamnya sebagai bentuk pengalaman-pengalaman mereka di bidang/kajian materi yang mereka lakukan. Hal ini sejalan dengan sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Metode pembelajaran dalam PKn dapat dinyatakan sebagai sosialisasi politik langsung. Hal ini sejalan dengan Cholisin, 2000: 6.24, bahwa metode belajar politik yang lain yang termasuk tipe sosialisasi politik langsung, seperti: imitasi, sosialisasi antisipatori, dan pengalaman politik dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran politik melalui PKn.

Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Oleh karena itu, sosialisasi politik dalam beberapa hal merupakan konsep/kunci sosiologi politik, antara lain:

- a. Ketiga konsep lain mengenai partisipasi, perekrutan dan komunikasi erat berkaitan dengan sosialisasi politik. Partisipasi dan perekrutan merupakan variabel-variabel dependen yang parsial dari sosialisasi dan komunikasi, karena keduanya menyajikan elemen dinamis dalam sosialisasi.

b. Sosialisasi politik memperlihatkan interaksi dan interdependensi perilaku sosial dan perilaku politik. Sebagai akibat wajar yang penting dari interaksi dan interdependensinya, ia menunjukkan interdependensi dari ilmu-ilmu sosial pada umumnya, sosiologi, dan ilmu politik pada khususnya (Rush & Althoff, 2007: 25-26).

Sosialisasi politik melalui sarana akademik dilakukan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), siswa mendapatkan kajian tentang pendidikan politik melalui materi-materi PKn dan menggunakan metode-metode pembelajaran dan didukung oleh media-media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, PKn merupakan sosialisasi politik langsung dalam persekolahan. Hal ini sejalan dengan teori, yakni dapat dikatakan bentuk sosialisasi politik langsung apabila seseorang menerima / mempelajari nilai-nilai informasi, sikap, pandangan-pandangan, keyakinan- keyakinan mengenai politik secara eksplisit. Misalnya, individu secara eksplisit mempelajari budaya politik, sistem politik konstitusi, partai politik, dsb (Cholisin, 2000: 8).

Pola belajar politik atau sosialisasi politik menurut teori sistem diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan sistem politik ideal yang ingin dibangun bangsanya. Bagi bangsa Indonesia sistem politik ideal yang hendak dibangun adalah sistem politik demokrasi pancasila, maka arah sosialisasi politik adalah pada sistem politik ini (Cholisin. 2000: 6.3-6.4). Sistem politik demokratis yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum



di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai sosialisasi politik langsung, siswa dapat secara eksplisit mempelajari pendidikan politik yang terangkum dalam materi-materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Materi-materinya mencakup tentang sistem politik, budaya politik, sosialisasi politik, partisipasi politik, dll.

Selain dari bentuk sarana akademik, ada pula sarana non akademik yang mendukung terjadinya proses pembelajaran pendidikan politik sebagai bentuk sosialisasi politik. Bentuk sosialisasi politik non akademik diperlihatkan pada kegiatan-kegiatan, baik dari dalam sekolah maupun luar sekolah yang masuk ke dalam lingkungan sekolah sebagai suatu bentuk sosialisasi dari luar. Kegiatan yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah antara lain adalah adanya organisasi OSIS yang memperlihatkan suatu bentuk nyata bagaimana mengemukakan pendapat, cara melakukan sebuah orasi di depan warga sekolah, bagaimana berpartisipasi dalam bentuk kegiatan pemilihan ekstrakurikuler, ataupun pemilihan ketua MPK dan OSIS. Dalam kegiatan-kegiatan itu, terlihat adanya proses interaksi dan reaksi dari proses interaksi tersebut sebagai pengaruh dari lingkungan sosial. Selain itu, ada pula kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler-ekstrakurikuler sebagai jalur sosial bagi siswa untuk

berpartisipasi sebagai proses interaksi antar siswa. Seperti halnya pada kegiatan pemilihan OSIS dan MPK, pihak OSIS sebelumnya mengadakan sosialisasi politik dimana mereka melakukan orasi sebelum dipilih sebagai ketua OSIS. Calon kandidat-kandidat OSIS mengaspirasikan diri mereka masing-masing di halaman sekolah sebagai bentuk sosialisasi diri mereka untuk meyakinkan warga sekolah lain dapat memilihnya sebagai ketua OSIS.

Selain dilakukan oleh pihak sekolah sendiri, ada juga bentuk sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), yang memberikan gambaran bagi siswa bagaimana menjadi warga negara yang baik dalam memilih seorang pemimpin, tanpa melihat dari ketenarannya tetapi mereka dibekali pemikiran-pemikiran bagaimana dapat menjadi partisipan yang baik dalam hal kegiatan pemilihan umum. Hal ini dapat dikategorikan sebagai metode pengalaman politik (*political experience*), yang sejalan dengan Cholisin (2000: 6), bahwa metode *political experience* ini sering ditafsirkan secara tumpang tindih dengan konsep pendidikan politik pada pengalaman politik. Penekanannya pada orang yang sedang belajar politik (disosialisasikan) sedangkan pada pendidikan politik pada yang sedang mensosialisasikan (*socializer*). Pengalaman politik tidak mesti positif misalnya pengalaman yang pahit melakukan kontak dengan pejabat terlibat dalam pembuatan keputusan yang otoriter dapat menyebabkan partisipan menjadi frustrasi, bermusuhan dan mengasingkan diri dari proses politik. Hal ini merupakan sosialisasi

politik secara tidak langsung. Hal ini sejalan dengan Cholisin (2000: 6), yakni tipe sosialisasi politik tidak langsung melalui *Apprenticeship* (magang). Menurut tipe ini, aktivitas-aktivitas non politik dipandang sebagai praktek/magang untuk aktivitas politik. Contohnya, organisasi pembentuk pribadi seperti Pramuka, organisasi siswa, dll adalah bentuk yang penting dalam pembelajaran politik.

Kegiatan – kegiatan ekstrakurikuler dilakukan oleh masing-masing siswa sesuai dengan minat mereka masing, yang dilakukan tanpa adanya paksaan dari faktor mana pun sebagai bentuk partisipasi siswa. Hal ini sejalan dengan Partisipasi merupakan salah satu ciri warga negara yang baik. Tidak alasan bagi seorang warga negara untuk tidak berpartisipasi, karena partisipasi merupakan suatu keharusan bagi warga negara, sebagai pemilik kedaulatan. Tanpa adanya partisipasi warga masyarakat, maka kehidupan demokrasi akan terhambat dalam perkembangannya. Secara umum, partisipasi dapat dirumuskan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam proses bernegara, pemerintahan, dan bermasyarakat. Ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan warga negara berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan pemerintahan (Wasistiono, 2003 dalam Nuralina K dan Syaifullah, 2008), yaitu:

- 1) Ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan)
- 2) Ada keterlibatan secara emosional

- 3) Memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.

Selain kegiatan-kegiatan di atas, ternyata pihak warga sekolah menjalankan kegiatan *coffee morning*, yakni kegiatan yang dilakukan oleh pihak siswa dan pihak guru sebagai kegiatan sosialisasi terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi selama melakukan aktivitas belajar mengajar. Kegiatan *coffee morning* ini dilakukan setiap hari senin pagi setelah upacara bendera sebagai forum komunikasi siswa dan guru untuk menjadi bahan kajian dan apabila ditemukan masalah, maka akan diselesaikan secara bersama-sama secara kekeluargaan.

Apabila ilmuwan-ilmuwan politik kurang sekali memperhatikan sosialisasi politik atau mereka terlalu menerima sebagaimana adanya, para antropolog, psikologi sosial, dan sosiolog sudah mengetahuinya sebagai konsep yang penting dan dari disiplin-disiplin ilmu inilah kemudian dapat disimpulkan tiga definisi awal mengenai sosialisasi, antara lain:

- 1) Pola-pola mengenai aksi sosial, atau aspek-aspek tingkah laku yang menanamkan pada individu keterampilan- keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif-motif dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasi, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.
- 2) Segenap proses dengan mana individu yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk

mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.

- 3) Komunikasi dengan dan dipelajari dari manusia lainnya, dengan siapa individu itu secara bertahap memasuki beberapa jenis relasi-relasi umum (Rush & Althoff, 2007: 25).

Dari beberapa definisi di atas dapat diketengahkan beberapa segi penting sosialisasi. Pertama, sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman, atau seperti yang dinyatakan oleh Aberle sebagai “pola-pola aksi”. Kedua, memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dalam batas-batas yang luas; dan lebih khusus lagi berkenaan dengan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap. Ketiga, sosialisasi itu tidak perlu dibatasi sampai pada usia kanak-kanak dan masa remaja saja (sekalipun pada usia tersebut merupakan periode-periode yang paling penting dan berarti), akan tetapi sosialisasi itu tetap berlanjut sepanjang kehidupan. Selain itu, sosialisasi merupakan pra-kondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, dan baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial (Rush & Althoff, 2007: 25-28).

Dari deskripsi peneliti tentang makna pendidikan politik di atas, dapat dinyatakan bahwa makna pendidikan politik adalah sosialisasi politik, yang terbagi menjadi sosialisasi politik langsung dan sosialisasi politik tidak langsung.

Dari 13 informan, ternyata yang berpandangan bahwa makna pendidikan politik adalah sosialisasi politik ada 11 informan, sedangkan yang 2 informan memiliki pandangan yang berbeda.

Menurut Hermiyati, bahwa makna pendidikan politik adalah:

“Menurut saya, pendidikan politik itu memang penting untuk dipelajari sebagai penanaman nilai bagi siswa untuk mereka nantinya siapa tahu ingin terjun di dunia politik. Namun, pada kenyataannya selama ini yang mereka alami pendidikan politik adalah sistem politik yang selalu berhubungan dengan uang. Mengapa? Karena dengan mereka mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kampanye dan sebagainya itu menurut mereka itu bisa menghasilkan uang. Jadi, menurut pandangan saya pendidikan politik itu bagaimana mereka bisa mengaktifkan diri di masyarakat nantinya dalam dunia politik yang mereka anggap bahwa politik itu untuk kekuasaan”.

Sejalan dengan pendapat Ginta yang mengatakan bahwa makna pendidikan politik adalah:

“Pendidikan politik menurut saya itu adalah pendidikan yang kejam karena setelah mendapatkan pendidikan politik pasti kebanyakan orang-orang yang terjun di dunia politik itu adalah menginginkan kekuasaan yang nantinya akan menjajah kita sebagai warga negara dengan cara-cara politiknya. Oleh karena itu, pendidikan politik penting dilakukan agar orang-orang terjun di dunia politik itu tidak dipandang sebagai orang-orang yang haus akan kekuasaan sehingga politik itu dipandang kejam oleh setiap orang yang memandangnya. Sosialisasi yang saya dapatkan dari politik itu adalah dari kampanye-kampanye yang dialukan oleh partai politik yang banyak memberikan janji-janji agar kita dapat memilih mereka sebagai pemimpin dalam suatu daerah. Contohnya saja waktu sebelum diadakannya pemilukada para aktor politik mengkampanyekan partainya untuk dapat mendukung dia dalam pemilihan gubernur”.

Jadi, menurut Hermiyati dan Ginta makna pendidikan politik adalah pengetahuan politik, yakni membawa seseorang ke dalam tingkat partisipasi politik tertentu. Dalam hal ini, partisipasi politik tertentu dimaksudkan setiap warga negara memiliki kemampuan melek politik yang



berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan mereka bagaimana memandang sistem politik itu.

**Tabel. 4.2**  
**Makna Pendidikan Politik Menurut Beberapa Informan**

No	Sosialisasi Politik	Pengetahuan Politik	Keterangan
1.	Desi		Proses membekali siswa untuk dapat berpartisipasi aktif sebagai penanaman nilai demokratis secara terus menerus dari gnerasi ke generasi. Proses sosialisasi politik dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
2.	Wiwik		
3	Marshinta		
4	Deka		
5	Fatia		
6	Bunaya		
7	Viola		
8	Fraya		
9	Indah		
10	Reza		
11	Hery		
12		Hermiyati	Membawa seseorang ke dalam tingkat partisipasi politik tertentu.
13		Ginta	

### 1.1 Makna Pendidikan Politik sebagai Sosialisasi Politik

Menurut pandangan beberapa responden guru, makna dari pendidikan politik adalah pendidikan yang memiliki fungsi membina siswa agar menjadi warga negara yang baik, dalam hal ini dalam mengemukakan

hak dan kewajiban mereka secara bertanggung jawab. pendidikan politik itu adalah pendidikan yang bertujuan membekali anak didik untuk menjadi warga negara yang mandiri. Mandiri dalam hal ini adalah bagaimana mereka dapat memecahkan suatu permasalahan yang mereka temui di berbagai kegiatan keseharian mereka. Dalam hal ini dituangkan ke dalam materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Sejalan dengan makna pendidikan politik yang memiliki tujuan mendidik dan mengatur diri sendiri untuk dapat berproses menjadi manusia dewasa dalam mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan-tujuan politik dan telah memikirkan resiko yang akan didapat dari apa yang telah dilakukan. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan politik maupun politik pendidikan itu sendiri, maka kedudukan pendidikan politik sangatlah strategis. Affandi (1996:25) menyatakan pendidikan politik '*political education*' sering kali menggunakan berbagai peristilahan lain seperti '*political socialization* dan '*citizenship training*'. Rusadi Kantaprawira (1988:54) memandang pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Dalam perspektif ini, pendidikan politik merupakan metode untuk melibatkan rakyat dalam sistem politik melalui partisipasinya dalam menyalurkan tuntutan dan dukungannya.

Di sekolah, anak banyak belajar pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku politik secara eksplisit, terutama melalui mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn). Melalui mata pelajaran PKn, anak diajarkan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, sistem politik, otonomi daerah, partai politik, budaya politik, dsb. Melalui pelajaran ini, anak diharapkan pada gilirannya dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan negaranya.

Pentingnya pendidikan politik dalam rangka menanamkan nilai-nilai moral dengan cara yang demokratis, yakni memberikan bekal pengetahuan, pengalaman melalui interaksi-interaksi dalam kegiatan belajar melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal. Kegiatan belajar melalui pendidikan formal, yakni melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), sedangkan pendidikan non formal adalah kegiatan-kegiatan kurikuler non formal, seperti kegiatan di luar kelas.

Selain itu, pandangan lain mengenai makna pendidikan politik oleh beberapa responden guru yang sejalan dengan pandangan di atas adalah pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral kepada siswa untuk dapat mengembangkan karakter menjadi warga negara yang baik, yakni tahu akan hak dan kewajibannya. Dalam pendidikan politik siswa dituntut untuk dapat mengerti dulu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban mereka sebagai siswa di sekolah, karena hal ini merupakan point yang paling penting dalam tujuan pendidikan politik. Siswa diharapkan paham apa yang seharusnya mereka terima dan apa yang menjadi kewajiban mereka di sekolah sebagai pembentuk karakter siswa untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, makna pendidikan

politik adalah proses penanaman nilai-nilai demokrasi terhadap siswa untuk menjadikan warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut pandangan beberapa responden siswa, makna pendidikan politik adalah pendidikan yang mengajarkan bagaimana siswa dapat berdemokrasi, dengan tujuan membekali siswa untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Cara – cara demokrasi ditunjukkan dengan metode-metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, dimana siswa dibebaskan mengemukakan pendapatnya, mempertahankan argumennya secara bebas dan bertanggung jawab. Pendidikan politik adalah pendidikan yang memberikan bekal kepada generasi muda untuk dapat berpartisipasi dalam menyampaikan pendapatnya dengan bebas dan bertanggung jawab di muka umum sebagai penanaman nilai pembentukan diri siswa untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Selain itu, tujuan dari pendidikan politik itu adalah bagaimana kehidupan demokrasi dapat terwujud dengan cara-cara yang efektif, seperti mengemukakan pendapat yang bebas dan bertanggung jawab, debat di saat melakukan diskusi, musyawarah untuk mencapai mufakat. Sejalan dengan teori pengertian pendidikan politik yang dikemukakan oleh Alfian, 1986: 235 (dalam Sumantri, 2003: 3.2), adalah “Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai

yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun”.

Sedangkan menurut Inpres No. 12 Tahun 1982, “Pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien”.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa makna pendidikan politik adalah pendidikan yang membekali siswa untuk dapat berpartisipasi dalam mengemukakan pendapat sesuai dengan hati nurani untuk mencari solusi secara bersama-sama sebagai tujuan bersama sebagai proses penanaman nilai dan karakter terhadap siswa untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan pandangan Hery, bahwa makna pendidikan politik adalah pendidikan yang terdapat dalam setiap mata pelajaran yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pendidikan politik adalah Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat kajian-kajian ilmu politik untuk menanamkan nilai pada siswa tentang sistem pemerintahan, sistem politik, dan cara berdemokrasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa makna pendidikan politik adalah pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

sebagai sosialisasi penanaman nilai-nilai karakter untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan sistem politik yang sedang berkembang. Oleh sebab itu, pernyataan ini dapat disebut sebagai sosialisasi politik.

## 1.2 Pendidikan Politik sebagai Pengetahuan Politik

Berbeda dengan pernyataan di atas, bahwa makna pendidikan politik adalah pengetahuan politik, yang dinyatakan oleh Hermiyati dan Ginta bahwa:

Menurut Hermiyati, bahwa makna pendidikan politik adalah:

“Menurut saya, pendidikan politik itu memang penting untuk dipelajari sebagai penanaman nilai bagi siswa untuk mereka nantinya siapa tahu ingin terjun di dunia politik. Namun, pada kenyataannya selama ini yang mereka alami pendidikan politik adalah sistem politik yang selalu berhubungan dengan uang. Mengapa? Karena dengan mereka mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kampanye dan sebagainya itu menurut mereka itu bisa menghasilkan uang. Jadi, menurut pandangan saya pendidikan politik itu bagaimana mereka bisa mengaktifkan diri di masyarakat nantinya dalam dunia politik yang mereka anggap bahwa politik itu untuk kekuasaan”.

Sejalan dengan pendapat Ginta yang mengatakan bahwa makna pendidikan politik adalah:

“Pendidikan politik menurut saya itu adalah pendidikan yang kejam karena setelah mendapatkan pendidikan politik pasti kebanyakan orang-orang yang terjun di dunia politik itu adalah menginginkan kekuasaan yang nantinya akan menjajah kita sebagai warga negara dengan cara-cara politiknya. Oleh karena itu, pendidikan politik penting dilakukan agar orang-orang terjun di dunia politik itu tidak dipandang sebagai orang-orang yang haus akan kekuasaan



sehingga politik itu dipandang kejam oleh setiap orang yang memandangnya. Sosialisasi yang saya dapatkan dari politik itu adalah dari kampanye-kampanye yang dialukan oleh partai politik yang banyak memberikan janji-janji agar kita dapat memilih mereka sebagai pemimpin dalam suatu daerah. Contohnya saja waktu sebelum diadakannya pemilu maka para aktor politik mengkampanyekan partainya untuk dapat mendukung dia dalam pemilihan gubernur”.

Jadi, menurut Hermiyati dan Ginta makna pendidikan politik adalah pengetahuan politik, yakni membawa seseorang ke dalam tingkat partisipasi politik tertentu. Dalam hal ini, partisipasi politik tertentu dimaksudkan setiap warga negara memiliki kemampuan melek politik yang berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan mereka bagaimana memandang sistem politik itu.

Pengetahuan politik di sini adalah proses membawa seseorang ke dalam tingkat partisipasi politik tertentu. Sejalan dengan teori Affandi, 1996: 27 bahwa pengetahuan politik akan membawa orang pada tingkat partisipasi tertentu. Dalam politik seseorang tidak hanya dituntut mengembangkan pengetahuan juga harus mengembangkan aspek sikap dan keterampilan. Dalam hal ini pengetahuan politik bertujuan menjadikan warga negara untuk melek politik. sejalan dengan Crick & Porter dalam Affandi (1996:27), disebut melek politik “*political literacy*”. Dari aspek pengetahuan seseorang dikatakan melek politik apabila sekurang-kurangnya menguasai tentang: (1) informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan, dari mana uang berasal, bagaimana sebuah institusi bekerja; (2) bagaimana melibatkan diri secara aktif dalam memanfaatkan

pengetahuan; (3) kemampuan memprediksi secara efektif bagaimana cara memutuskan sebuah isu; (4) kemampuan mengenal tujuan kebijakan secara baik yang dapat dicapai ketika isu (masalah) telah terpecahkan; (5) kemampuan memahami pandangan orang lain dan membenarkan mereka tentang tindakannya dan membenarkan tindakan dirinya sendiri. Kemampuan tadi tentu saja berbeda pada setiap orang bergantung pada tingkat melek politiknya.

Berdasarkan hasil pandangan di atas, dapat dinyatakan bahwa makna pendidikan politik adalah dimana seseorang melakukan suatu sistem politik dengan berpartisipasi ke dalam politik dengan kepentingan tertentu. Hal ini disebut sebagai pengetahuan politik.

## **2. Kajian atau Ruang Lingkup Pembelajaran Pendidikan Politik pada Sekolah Menengah Atas kota Pangkalpinang**

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwa kajian atau ruang lingkup pendidikan politik ada dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai esensi pengembangan karakter yang dirangkum dalam sebuah kurikulum. Materi yang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mengkaji bahasan mengenai sistem politik, partisipasi politik, budaya politik, sosialisasi politik, dan lain-lain yang berkaitan dengan kajian pendidikan politik dan berlandaskan UUD 1945.

Di sekolah, diterapkan budaya salam sapa yang dilakukan oleh siswa-siswanya. Dalam hal ini, penanaman nilai – nilai budaya sopan santun

siterapkan dalam lingkungan sekolah. Dalam menjalankan kegiatan, seperti kegiatan akademik dan non akademik dilaksanakan dengan baik sebagaimana sesuai dengan kajian pendidikan politik, yakni menanamkan nilai-nilai karakter bangsa melalui internalisasi nilai-nilai moral terhadap setiap warga negara. Hal ini sejalan dengan teori kajian materi pendidikan politik Sekolah Menengah Atas adalah mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai toleransi, menghargai, cinta tanah air, kebijaksanaan, pengabdian, persamaan derajat, patriotisme, musyawarah, gotong royong, kasih sayang, kewaspadaan, ketertiban, kesatuan, keramahmatan, kesatuan, kedisiplinan, kesetiaan, tanggung jawab, kesatuan dan persatuan, demokrasi pancasila, keadilan dan kebenaran, ketaatan, pengendalian diri, dan tolong menolong (Sumantri, 2003: 8.18-8.20). Kesemua kajian pendidikan politik di atas dapat ditemukan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Dalam dunia persekolahan, kajian pendidikan politik didapat dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dalam hal ini terangkum dalam dokumen silabus sebagai analisis kurikulum yang dilakukan oleh masing-masing guru. Kajian materi PKn mencakup materi-materi yang membahas tentang pendidikan politik, antara lain terangkum dalam silabus yang merupakan analisis kurikulum, yakni tentang HAM (Hak Asasi Manusia), sistem politik, sosialisasi politik, budaya politik, partisipasi politik, demokrasi, bangsa dan negara yang membahas tentang warga negara sebagai makhluk sosial dan individu sebagai proses

pengembangan karakter sesuai dengan tujuan dari pendidikan politik, yakni mengembangkan karakter siswa melalui penanaman nilai-nilai demokratis. Hal ini sejalan dengan pendidikan untuk warga negara dan masyarakat demokratis harus difokuskan pada kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, ilmiah, dalam proses politik di dalam *civil society* (Budimansyah dan Winataputra, 2007: 190). Kecakapan-kecakapan tersebut jika menggunakan istilah dari Branson (1988: 9) dapat dikategorikan sebagai *interacting*, *monitoring*, dan *influencing*. Interaksi berkaitan dengan kecakapan-kecakapan warga negara dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Berinteraksi ialah tanggap terhadap warga negara lain, bertanya, menjawab, dan berunding dengan santun, demikian juga membangun koalisi-koalisi dan mengelola konflik dengan cara damai dan jujur. Mengawasi (*monitoring*) berarti fungsi pengawasan warga negara terhadap sistem politik dan pemerintah. Mempengaruhi (*influencing*) mengisyaratkan pada kemampuan proses politik dan pemerintahan baik proses formal maupun informal dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk kajian-kajian dalam pendidikan politik dalam menjadikan warga negara demokratis sebagai warga negara yang partisipatif dengan cara yang demokratis.

Dalam penelitian, guru telah melakukan analisis terhadap materi-materi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan untuk mempermudah menganalisis kajian pendidikan politiknya. Sejalan dengan tujuan pendidikan politik dalam mendidik siswa untuk menjadi warga

negara yang berkarakter, guru telah menerapkan materi-materi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kajian dari pendidikan politik, antara lain sosialisasi politik yang telah berjalan baik dalam kegiatan belajar mengajar, yakni guru menyampaikan materi sesuai dengan silabus yang telah mereka analisis sebagai pedoman dalam menyampaikan kajian pendidikan politik. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran didukung oleh metode-metode pendidikan politik sebagai bentuk terlaksananya kajian pendidikan politik di sekolah.

Materi – materi Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan kajian dari pendidikan politik berdasarkan esensi pengembangan karakter adalah pada kelas X Sekolah Menengah Atas, terdapat kajian materi tentang hakikat bangsa dan negara, sistem hukum dan peradilan nasional, HAM (Hak Asasi Manusia), substansi konstitusi (UUD 1945), kedudukan warga negara, dan Sistem politik Indonesia. Untuk kajian materi di kelas XI, adalah budaya politik di Indonesia, budaya demokrasi, dan hubungan organisasi nasional dan internasional. Sedangkan kajian materi pada kelas XII adalah pancasila sebagai ideologi terbuka, sistem pemerintahan, peranan pers dalam masyarakat demokrasi, dan globalisasi. Dalam materi-materi tersebut telah mengandung nilai-nilai dalam membangun karakter warga negara. Nilai-nilai karakternya yang sesuai dengan tujuan pendidikan politik adalah jujur, toleransi, kreatif, mandiri, tanggung jawab, adil, patriotisme, dan demokratis. Hal ini sejalan dengan Kajian materi pendidikan politik Sekolah Menengah Atas adalah mengembangkan karakter berdasarkan nilai-

nilai toleransi, menghargai, cinta tanah air, kebijaksanaan, pengabdian, persamaan derajat, patriotisme, musyawarah, gotong royong, kasih sayang, kewaspadaan, ketertiban, kesatuan, keramahtamahan, kesatuan, kedisiplinan, kesetiaan, tanggung jawab, kesatuan dan persatuan, demokrasi pancasila, keadilan dan kebenaran, ketaatan, pengendalian diri, dan tolong menolong (Sumantri, 2003: 18-20).

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya digunakan dalam pengertian yang luas seperti "*citizenship education*" atau "*education for citizenship*" yang mencakup pendidikan kewarganegaraan di dalam lembaga pendidikan formal (dalam hal ini di sekolah dan dalam program pendidikan guru) dan di luar sekolah baik yang berupa program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang atau sebagai dampak pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga negara Indonesia yang cerdas dan baik. Di samping itu, juga konsep pendidikan kewarganegaraan digunakan sebagai nama suatu bidang kajian ilmiah yang melandasi dan sekaligus menaungi pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan demokrasi.

Hal tersebut sejalan dengan Menurut UU No. 20 Tahun 2003, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara ontologi merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Ciri-ciri dari PKn antara lain:



- 1) Materinya berupa pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara dengan PPBN (Pendidikan Pendahuluan Bela Negara).
- 2) Bersifat interdisipliner.
- 3) Bertujuan bagaimana membentuk warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. (Kurikulum 2006)

Dari pengertian dan ciri-ciri PKn di atas dapat diartikan bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan membentuk karakteristik warga negara dalam hal terutama membangun bangsa dan negara dengan mengandalkan pengetahuan dan kemampuan dasar dari pembelajaran PKn dengan materi pokoknya demokrasi politik atau peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini terlihat pada analisis kurikulum yang dilakukan oleh guru di sekolah yang telah terprogram.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik adalah dimana terjadi sosialisasi politik melalui pembelajaran di kelas. PKn memiliki tujuan yang sama dengan pendidikan politik, yakni sebagai pendidikan formal (dalam hal ini di sekolah dan dalam program pendidikan guru) dan di luar sekolah baik yang berupa program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang atau sebagai dampak pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga negara Indonesia yang cerdas dan baik. Di samping itu, juga konsep pendidikan kewarganegaraan digunakan sebagai nama suatu bidang kajian ilmiah yang melandasi dan sekaligus menaungi pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan demokrasi.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penting ketika pemerintah menetapkan PKn menjadi salah satu mata pelajaran yang diwajibkan untuk dimuat dalam kurikulum sekolah. Hal ini dapat dilihat dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang antara lain mewajibkan isi kurikulum wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan yang pada prinsipnya bertujuan membentuk *good citizenship* dan menyiapkan warga negara untuk masa depan. Dalam pendidikan formal, proses demokratisasi harus dimulai dari tahap yang paling awal yaitu pemberian kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan politik sebagai bagian dari sosialisasi politik dilakukan melalui agen-agen seperti keluarga, masyarakat, teman sebaya, dan tentunya bisa juga lewat sekolah sebagai lembaga formal. Pendidikan politik lewat sekolah dilakukan melalui mata pelajaran di sekolah dan salah satu yang paling penting adalah Pendidikan Kewarganegaraan.

Generasi muda sebagai pewaris cita-cita bangsa dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam membangun bangsa. Oleh sebab itu, generasi muda harus memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan politik sehingga para generasi muda menggunakan pengetahuannya untuk berpolitik secara bertanggung jawab. Pendapat ini sejalan dengan Brownhill (1989:4) yang mengungkapkan bahwa:

*The aim of political education should therefore be to develop the professional's interest and to point them toward their political responsibilities, while at the same time endeavouring to give them the necessary knowledge and skills to carry out those responsibilities.*

Tujuan pendidikan politik sebenarnya secara alamiah telah berjalan dan terus berlangsung melalui berbagai interaksi sosial dalam masyarakat yang dikenal sebagai transformasi nilai. Melalui proses transformasi tersebut, manusia akan dapat menilai bahwa sesuatu dianggap baik atau buruk. Namun demikian, walaupun proses penghayatan nilai berlangsung secara alamiah, dalam kenyataannya, akan lebih berhasil apabila dilakukan secara sadar dan berencana melalui proses pendidikan (Sumantri, 2003: 3.13).

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Sudjatmiko, 2008: 12).

Dari 13 informan, ternyata yang berpandangan tentang kajian atau ruang lingkup pendidikan politik pada materi pendidikan politik ada 12 informan, sedangkan ada satu informan yang berpendapat berbeda.

Namun, berbeda dengan Marshinta, bahwa kajian atau ruang lingkup pendidikan politik adalah:

“Penanaman nilai moral kepada siswa dengan tujuan membentuk karakter anak bangsa sesuai dengan kemampuannya masing-masing yang telah didapatkan sejak memasuki jenjang Sekolah Menengah Atas sampai nanti mereka keluar dari bimbingan pembelajaran di Sekolah Menengah Atas, sebagai bentuk pendewasaan diri siswa untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Ternyata, menurut Marshinta kajian atau ruang lingkup pendidikan politik adalah komunitas politik.

Komunias politik dalam penelitian ini ditunjukkan dari hasil wawancara berdasarkan pandangan informan, yaitu menekankan pada pendekatan moral, demokrasi, berdasarkan pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini sejalan dengan teori bahwa dalam meninjau kerangka kerja suatu eksistensi pelaku politik, kita tidak harus mengikuti perkembangan negara idaman yang tak dapat dicapai, melainkan kita harus merumuskan suatu versi ideal yang sesungguhnya melalui cara yang lebih abstrak.

**Tabel 4.3**  
**Kajian atau Ruang Lingkup Pendidikan Politik**

No	Materi Pendidikan Kewarganegaraan	Komunitas Politik	Keterangan
1.	Desi		Kelas X: hakikat bangsa dan negara, sistem hukum dan peradilan nasional, HAM (Hak Asasi Manusia), substansi konstitusi (UUD 1945), kedudukan warga negara, dan Sistem politik Indonesia. Kelas XI: budaya politik di Indonesia, budaya demokrasi, dan hubungan organisasi nasional dan inernasional. Kelas XII: pancasila sebagai ideologi terbuka, sistem pemerintahan, peranan pers dalam masyarakat
2.	Wiwik		
3	Hermiyati		
4	Deka		
5	Fatia		
6	Bunaya		
7	Viola		
8	Fraya		
9	Indah		
10	Reza		

11	Hery		demokrasi, dan globalisasi.
12	Ginta		
13		Marshint	Menekankan pada pendekatan moral, demokrasi, berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini sejalan dengan teori bahwa dalam meninjau kerangka kerja suatu eksistensi pelaku politik, kita tidak harus mengikuti perkembangan negara idaman yang tak dapat dicapai, melainkan kita harus merumuskan suatu versi ideal yang sesungguhnya melalui cara yang lebih abstrak.

## 2.1 Materi Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut pandangan beberapa responden guru, kajian atau ruang lingkup pendidikan politik adalah kajian yang menjelaskan tentang sosialisasi politik, budaya politik, sistem pemerintahan, bela negara, dll yang berkaitan dengan pengembangan pemahaman siswa terhadap diri mereka untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Penanaman nilai demokrasi sebagai tujuan dari pendidikan politik dibentuk dan

dikembangkan bagi warga negara agar memiliki kesadaran politik dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik ditinjau dari sudut proses merupakan upaya pewarisan nilai-nilai budaya bangsa, proses peningkatan dan pengembangan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

Menurut pandangan beberapa responden siswa bahwa kajian atau ruang lingkup dari pendidikan politik adalah didapatkan pada kajian materi Pendidikan Kewarganegaraan, yang mencakup kajian ilmu-ilmu politik, antara lain tentang sosialisasi politi, partisipasi politik, sistem politik, budaya politik, dll. Pendidikan politik juga mengkaji bagaimana memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan, agar mampu berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara dan observasi, yakni materi – materi Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan kajian dari pendidikan politik berdasarkan esensi pengembangan karakter adalah pada kelas X Sekolah Menengah Atas, terdapat kajian materi tentang hakikat bangsa dan negara, sistem hukum dan peradilan nasional, HAM (Hak Asasi Manusia), substansi konstitusi (UUD 1945), kedudukan warga negara, dan Sistem politik Indonesia. Untuk kajian materi di kelas XI, adalah budaya politik di Indonesia, budaya demokrasi, dan hubungan organisasi nasional dan inernasional. Sedangkan kajian materi pada kelas XII adalah pancasila sebagai ideologi terbuka, sistem pemerintahan, peranan pers dalam masyarakat demokrasi, dan globalisasi.



Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik memiliki tujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral untuk siswa dapat berpartisipasi secara aktif dengan cara yang demokratis. Hal ini sejalan dengan pendidikan politik yang jelas berbeda dengan indoktrinasi politik, yang merupakan belajar politik yang bersifat monolog bukan dialog, lebih mengutamakan pembangkitan emosi, dan lebih merupakan pengarahan politik untuk dukungan kekuatan politik (mobilisasi politik) dari pada meningkatkan partisipasi politik. Indoktrinasi politik ini pada umumnya dilakukan oleh rezim otoriter atau totaliter untuk mempertahankan status-quo, partai politik juga pada umumnya lebih banyak menggunakan indoktrinasi politik dari pada pendidikan politik (Cholisin, 2000: 6.2 - 6.8). Oleh sebab itu, Pendidikan Kewarganegaraan dalam hal ini sebagai sosialisasi politik secara eksplisit menerapkan budaya demokratis dalam menanamkan nilai-nilai karakter bangsa dalam menjalankan tujuan dari pendidikan politik.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penting ketika pemerintah menetapkan PKn menjadi salah satu mata pelajaran yang diwajibkan untuk dimuat dalam kurikulum sekolah. Hal ini dapat dilihat dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang antara lain mewajibkan isi kurikulum wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan yang pada prinsipnya bertujuan membentuk *good citizenship* dan menyiapkan warga negara untuk masa depan. Dalam pendidikan formal, proses demokratisasi harus dimulai dari tahap yang paling awal yaitu pemberian kesempatan yang sama kepada

setiap individu untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan politik sebagai bagian dari sosialisasi politik dilakukan melalui agen-agen seperti keluarga, masyarakat, teman sebaya, dan tentunya bias juga lewat sekolah sebagai lembaga formal. Pendidikan politik lewat sekolah dilakukan melalui mata pelajaran di sekolah dan salah satu yang paling penting adalah Pendidikan Kewarganegaraan.

Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa (Hidayat dan Azra, 2008: 5).

Sejalan dengan pandangan Hery, bahwa kajian atau ruang lingkup pendidikan politik adalah terdapat pada materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam pelajaran PKn terdapat materi-materi yang syarat akan nilai-nilai politiknya antara lain sistem pemerintah, sistem politik, dan masih banyak lagi. Dalam materi PKn, terdapat tujuan menanamkan karakter kepada siswa untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka dan menjadi warga negara yang penuh tanggung jawab yang sejalan dengan tujuan pendidikan politik.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kajian atau ruang lingkup pendidikan politik adalah materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), sebagai nilai pengembangan moral.

## **2.2 Komunitas Politik**

Berdasarkan pandangan Marshinta yang berbeda, yang mengatakan bahwa kajian pendidikan politik adalah komunitas politik.

Dalam wawancara dengan Marshinta, menyatakan bahwa:

“Kajian atau ruang lingkup pendidikan politik adalah penanaman nilai moral kepada siswa dengan tujuan membentuk karakter anak bangsa sesuai dengan kemampuannya masing-masing yang telah didapatkan sejak memasuki jenjang Sekolah Menengah Atas sampai nanti mereka keluar dari bimbingan pembelajaran di Sekolah Menengah Atas, sebagai bentuk pendewasaan diri siswa untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Komunitas Politik dalam penelitian ini dimaksudkan adalah nilai-nilai moral, demokrasi, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Memang, pada dasarnya tujuan atau pentingnya dari pendidikan politik adalah menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa. Hal ini sejalan dengan teori bahwa melalui kegiatan pendidikan politik diharapkan terbentuk warga negara yang berkepribadian utuh, berketerampilan, sekaligus juga berkesadaran yang tinggi sebagai warga negara yang baik, sadar akan hak dan kewajiban serta memiliki rasa tanggung jawab yang dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pencapaian tujuan pendidikan politik tersebut tidak dapat dilihat secara langsung namun memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan karena pendidikan politik berhubungan dengan aspek sikap dan perilaku seseorang. Dalam meninjau kerangka kerja suatu eksistensi pelaku politik,

kita tidak harus mengikuti perkembangan negara idaman yang tak dapat dicapai, melainkan kita harus merumuskan suatu versi ideal yang sesungguhnya melalui cara yang lebih abstrak. Pendidikan politik terbatas untuk memberikan tinjauan yang berkelanjutan mengenai institusi dan kehidupan sehari-hari. Meninjau kependidikan itu sendiri mengingatkan atas apa yang kita harapkan untuk tercapai, yang juga menekankan pada pendekatan moral (Brownhill, 1989: IV).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dinyatakan pandangan Marshinta yang menyatakan bahwa kajian pendidikan politik terletak pada penanaman nilai-nilai dalam pengembangan karakter sebagai esensi dari Pendidikan Kewarganegaraan. Marshinta memiliki pandangan yang berbeda dari responden lain yang menyatakan bahwa kajian pendidikan politik terdapat pada Pendidikan Kewarganegaraan, karena menurutnya kajian pendidikan politik justru berangkat pada esensi dari materi-materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yakni bagaimana menanamkan nilai-nilai moral kepada siswa yang juga terangkum dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi, menurut Marshinta kajian pendidikan politik terletak pada tujuan dari pendidikan politik.

### **3. Model Pembelajaran Pendidikan Politik pada Sekolah Menengah Atas kota Pangkalpinang**

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwa pembuatan model pembelajaran pendidikan politik adalah berupa kurikulum pendidikan politik. Kurikulum dalam penelitian ini adalah fakta-fakta, observasi, data, persepsi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran guru dan pengalamannya yang diatur dan diorganisasikan dalam bentuk konsep, generalisasi, prinsip, dan pemecahan masalah.

Fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian, adalah dimana guru menyampaikan materi dengan menggunakan metode – metode dan media-media pembelajaran yang baik, dengan tujuan siswa dapat menerima materi dengan mudah dan efektif. Selain dari program pembelajaran yang merupakan kurikuler formal, dibentuk sebuah kurikuler non formal oleh pihak sekolah, yakni melalui kegiatan keorganisasian dan kegiatan ekstrakurikuler.

Dalam setiap kegiatan, guru menjadi pembina sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dengan begitu, siswa dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut akan terarah dan mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan dengan saling interaksi. Guru sebagai fasilitator dalam membangun semangat siswa untuk dapat melakukan aktivitas dari kegiatan tersebut, sehingga siswa dapat menjadi partisipan yang aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan kurikuler non formal. Contoh kegiatan yang

berhasil menjadi program sekolah adalah kegiatan LCC (Lomba Cerdas Cermat) UUD 1945, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Jurnalistik Rohis, olimpiade ekonomi, Palang Merah Indonesia (PMI), English Club, Japan Club, Pramuka, dan Tari tradisional. Semua kegiatan tersebut menjadi program terencana Sekolah yang telah terlaksana.

Selain itu, kurikulum juga diartikan sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang untuk mempengaruhi proses belajar dalam diri siswa. Guru mengkaji materi berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang telah dianalisis melalui kurikulum yang telah disusun oleh pihak sekolah dan disahkan oleh pemerintah. Dalam mengemas pembelajaran pendidikan politik, langkah yang dilakukan adalah dimana guru memprogramkan kurikuler formal (Materi Mata Pelajaran), dalam hal ini Pendidikan Kewarganegaraan dan kurikuler non formal (kegiatan-kegiatan ekstra di luar mata pelajaran) dan dianalisis berdasarkan kompetensi siswa, serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Guru sebagai fasilitator untuk membentuk kompetensi siswa menjadi lebih baik dan berkualitas dengan program-program yang dibentuk sesuai dengan standar kompetensi yang ada.

Hasil penelitian, guru menyusun Rancangan Program Pembelajaran (RPP) dalam penelitian ini adalah bagaimana seorang guru menganalisis materi yang ada dalam standar isi, yang merumuskan tujuan dari materi, memilih metode dan media pembelajaran untuk diaplikasikan



dalam kegiatan pembelajaran sebagai kegiatan mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Proses ini berisi penentuan yang berasal dari pengetahuan siswa, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang “perlakuan” berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Dalam hal ini, proses dapat terjadi berdasar pada materi yang disampaikan dari materi yang telah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa yang dipandu oleh guru atau dalam latar berbasis kelompok. Bentuk dari desain pembelajaran ini bisa berupa Rancangan Program Pembelajaran (RPP). Hal ini sejalan dengan teori desain pembelajaran menurut Wong dan Roulerson (1974) yang mengemukakan 6 langkah pengembangan desain pembelajaran, yaitu:

1. Merumuskan tujuan
2. Menganalisis tujuan tugas belajar
3. Mengelompokkan tugas-tugas belajar dan memilih kondisi belajar yang tepat
4. Memilih metode dan media
5. Mensintesis komponen-komponen pembelajaran
6. Melaksanakan rencana, mengevaluasi dan memberi umpan balik.

Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang tepat dan disesuaikan dengan kajian materi yang akan disampaikan. Metode-metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah metode menirukan atau simulasi kajian materi pendidikan politik agar siswa dapat lebih memahami makna dari materi yang akan

disampaikan oleh guru dengan mengalaminya langsung. Selain itu, dengan metode *role playing* (bermain peran), dalam hal ini siswa dilibatkan dalam pembahasan materi ke dalam bentuk sandiwara, simulasi, dll.

Hal ini sejalan dengan teori metode belajar politik yang termasuk tipe sosialisasi politik langsung, seperti: imitasi, sosialisasi antisipatori, dan pengalaman politik dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran politik melalui PKn. Begitu pula tipe sosialisasi politik tak langsung, seperti transfer interpersonal, magang dan generalisasi, dapat dimanfaatkan untuk menunjang PKn (Cholisin, 2000: 6.24).

Dari 13 informan, ternyata yang berpandangan tentang kemasan pembelajaran pendidikan politik berupa kurikulum ada 12 informan, sedangkan ada satu informan yang berpendapat bahwa kemasan pembelajaran pendidikan politik adalah berupa desain pembelajaran.

Menurut Hermiyati, kemasan pembelajaran pendidikan politik adalah:

“Guru harus mampu mengolah proses pembelajaran dengan metode-metode yang variatif dan inovatif dengan menggunakan media – media pembelajaran. Hal ini sesuai dengan analisis kurikulum yang dijadikan standar isi untuk memudahkan guru dalam memilih metode dan media yang sesuai dengan materi pembelajaran nantinya yang akan diajarkan pada proses pembelajaran”.

Jadi, berdasarkan pandangan Hermiyati, dapat diartikan bahwa kemasan pembelajaran pendidikan politik adalah berupa desain pembelajaran. Dalam hal ini guru mengolah bagaimana pembelajaran menjadi menarik untuk diikuti oleh siswa dapat siswa dapat dengan mudah mengartikan materi yang disampaikan.

**Tabel 4.4**  
**Model Pembelajaran Pendidikan Politik**

No	Kurikulum	Standar Isi	Keterangan
1.	Desi		Kurikuler Formal:
2.	Wiwik		Berisi tentang materi PKn (semua
3	Marshinta		program pembelajaran terangkum
4	Deka		dalam kurikulum PKn)
5	Fatia		Kurikuler organisasi:
6	Bunaya		Kegiatan ekstrakurikuler
7	Viola		OSIS
8	Fraya		Semua ini dibentuk oleh pihak
9	Indah		sekolah masing-masing
10	Reza		
11	Hery		
12	Ginta		
13		Hermiyati	Menganalisis materi yang ada dalam kurikulum, merumuskan tujuan dari materi, memilih metode dan media pembelajaran

### 3.1 Model Pembelajaran Pendidikan Politik dalam Kurikulum

Menurut pandangan beberapa responden guru, kemasan pembelajaran pendidikan politik adalah pembelajaran pendidikan politik dapat dikemas dengan bagaimana guru dapat membuat siswa dapat

mengembangkan dirinya dalam belajar, tidak dari guru yang menyetir tetapi bagaimana guru dapat membuat siswa merasa nyaman dalam menemukan makna dari pembelajaran pendidikan politik itu dari berbagai macam metode pembelajaran. Di kelas, diterapkan metode refleksi di awal pelajaran dengan tujuan siswa mengingat kembali materi apa yang sebelumnya dibahas dan menghubungkan dengan materi selanjutnya ketika bahasan sebelumnya memang berkaitan dengan materi berikutnya, sehingga siswa menjadi terarah dalam membentuk pola pikir mereka terhadap suatu pengetahuan dengan menggunakan metode yang efektif dan menggunakan media dengan baik. Guru dapat mengemas pembelajaran pendidikan politik dengan menganalisis SK dan KD sebagai rujukan untuk indikator-indikator mengajar di kelas dan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Dapat diibaratkan bahwa di sini guru sebagai koki dalam meramu atau meracik resep untuk dapat diaplikasikan sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Guru harus mampu mengolah pembelajaran dengan metode-metode yang variatif dan inovatif dengan menggunakan media – media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, sehingga siswa dapat mengkonstruksikan makna pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Siswa diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Guru hanya sebagai fasilitator, mediator, dan teman yang membuat situasi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri siswa.

Model pembelajaran pendidikan politik adalah bagaimana guru mengkaji materi berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang telah dianalisis melalui kurikulum yang telah disusun oleh pihak sekolah dan disahkan oleh pemerintah. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan mengemas kajian pembelajaran pendidikan politik dengan dielaborasi dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan tiga dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa, bukan indoktrinasi politik. hal ini sejalan dengan Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, kompetensi dasar, atau sering disebut kompetensi minimal, yang akan ditransformasikan dan ditransmisikan pada peserta didik terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- 1) Kompetensi pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*), yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan materi inti Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*), yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani.
- 2) Kompetensi keterampilan kewargaan (*civic skills*), yaitu kemampuan dan kecakapan mengartikulasikan keterampilan kewargaan seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan.

- 3) Kompetensi sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara antara lain komitmen akan kesetaraan gender, toleransi, kemajemukan, dan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM.

Ketiga kompetensi tersebut bertujuan membangun pembelajaran (*learning building*) Pendidikan Kewargaan ini yang dielaborasi melalui cara pembelajaran yang demokratis, partisipatif, dan aktif (*active learning*) sebagai upaya transfer pembelajaran (*transfer of learning*), nilai (*transfer of value*) dan prinsip-prinsip (*transfer of principles*) demokrasi dan HAM yang merupakan prasyarat utama tumbuh kembangnya masyarakat madani (Hidayat dan Azra, 2008: 8-9).

Menurut pandangan beberapa responden siswa bahwa kemas pembelajaran pendidikan politik adalah bagaimana mereka dapat memahami informasi yang disampaikan oleh guru berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka dalam penggunaan guru terhadap metode dan media sebagai fasilitas penyampaian materi di dalam kelas. Sedangkan pembelajaran pendidikan politik juga dialami di luar kelas, seperti dalam kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler-ekstrakurikuler sebagai contoh kegiatan non formal. Kegiatan formal pembelajaran pendidikan politik dapat dialami dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sosialisasi politik secara eksplisit.



Sejalan dengan Pendidikan politik di persekolahan akan menentukan sikap politik setiap individu yang dipengaruhi pula oleh faktor lingkungan serta keakuratan informasi yang diterima dari media cetak atau elektronik. Proses pendidikan politik yang dilakukan secara formal di persekolahan menjadi tahap awal untuk proses indoktrinasi politik. Hal ini sesuai dengan pendapat Brownhill (1989), bahwa *“Most opposition to the inclusion of political education in the curriculum comes from those who maintain that the teaching of politics in schools would be the first stepping stone to political indoctrination”*.

Guru-guru melakukan analisis Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) berdasarkan materi-materi yang telah dirangkum dalam standar isi sebagai hasil analisis kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Kemasan pembelajaran pendidikan politik adalah resep pembelajaran bagi guru sebagai koki bagi siswa untuk diaplikasikan ke dalam sebuah kemasan, yakni bagaimana guru dapat meracik atau mengkaji serta menganalisis Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada materi-materi pembelajaran dengan pemilihan metode pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan guru kepada siswa dengan tujuan siswa dapat memahami dan menganalisa sendiri pengetahuan mereka, baik pada tingkatan ranah kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Kemasan tersebut dapat berupa RPP (Rencana Program Pembelajaran). Jadi, bukan karena siswanya memiliki latar belakang pintar untuk keberhasilan suatu pengemasan pembelajaran, tetapi bagaimana guru

bisa menjadi koki yang baik dalam mengemas pembelajaran menjadi suatu bahasan yang menarik untuk siswa sehingga siswa menjadi paham akan apa yang mereka pelajari dan alami sendiri dengan penggunaan metode pembelajaran dan media pembelajaran.

Pendidikan politik merupakan sesuatu yang prinsip dan pokok dalam menopang pembangunan sistem politik suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas dan sistem pendidikan politiknya. Tanpa itu, maka suatu negara akan jauh tertinggal dengan negara lain, bahkan mungkin saja bisa runtuh atau bubar. Upaya untuk menjadikan pendidikan politik sebagai norma bagi kehidupan masyarakat harus diawali oleh adanya kemauan politik (*political will*) pemerintah.

Pendidikan politik salah satu sarana pembinaan warga negara, terutama generasi mudanya dalam rangka mempersiapkan regenerasi menyongsong hari depan bangsa yang lebih baik. Oleh karena itu, fungsi pendidikan politik adalah rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan warga negara guna menunjang keutuhan negara sebagai budaya bangsa.

Sejalan dengan pandangan Hery, bahwa kemasan pembelajaran pendidikan politik adalah dimana guru dapat menjadi fasilitator yang baik bagi siswa dalam menyampaikan materi pendidikan politik. Dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan politik guru-guru dapat memberikan pembelajaran melalui berbagai metode pembelajaran, baik metode ceramah, meniru, belajar di luar kelas, dll karena dapat menambah wawasan siswa

tentang pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi, kemasan pembelajaran pendidikan politik itu didasarkan pada tiga aspek, yaitu berdasarkan kemampuan guru menganalisis materi berdasarkan kemampuan siswa, ketersediaan sarana, dan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Dari beberapa pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa kemasan pembelajaran pendidikan politik adalah berupa kurikulum. Kurikulum adalah niat dan rencana, proses belajar mengajar adalah pelaksanaannya. Dalam proses tersebut ada dua subjek yang terlibat yakni guru dan siswa. Siswa adalah subjek yang dibina dan guru adalah subjek yang membina. PKN sebagai pendidikan politik di sekolah, maka konsekuensinya akan mengutamakan tipe sistem politik langsung. Isi sosialisasi mengutamakan orientasi politik yang bersifat eksplisit, yang kemudian diprogram sebagaimana yang tercermin dalam kurikulum, pola belajar politik bersifat terbuka, rasional, dan arahnya untuk mewujudkan warga negara yang baik.

### **3.2 Model Pembelajaran Pendidikan Politik dalam Standar Isi**

Berbeda dengan pandangan Hermiyati, yang menyatakan bahwa kemasan pembelajaran pendidikan politik berupa standar isi. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Hermiyati yang menyatakan bahwa:

“Guru harus mampu mengolah proses pembelajaran dengan metode-metode yang variatif dan inovatif dengan menggunakan media – media pembelajaran. Hal ini sesuai dengan analisis kurikulum yang dijadikan standar isi untuk memudahkan guru dalam memilih metode dan media yang

sesuai dengan materi pembelajaran nantinya yang akan diajarkan pada proses pembelajaran”.

Standar isi dalam penelitian ini adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang diturunkan dalam kriteria tentang SKL (Standar Kompetensi Lulus), kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam kata lain bahwa standar isi merupakan pengembangan dari kurikulum bagi seorang guru untuk mempermudah dalam pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan politik dengan menggunakan analisis Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dari sebuah silabus. Standar isi juga mencakup analisis materi pokok ke dalam sebuah indikator – indikator untuk mempermudah penyampaian informasi kepada siswa. Hal ini sejalan dengan hasil dokumentasi tentang analisis Standar Kompetensi Lulus atau pemetaan standar isi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Standar isi dimaksudkan berisi tentang Standar Kompetensi Lulus (SKL), Standar Kompetensi dari materi untuk disampaikan kepada siswa, Kompetensi dasar dari Standar Kompetensi, lalu dikembangkan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam kajian materi.

Oleh karena itu, Hermiyati berpandangan bahwa dalam mengemas pembelajaran pendidikan politik harus berdasarkan Kompetensi dasar dalam Pendidikan Kewarganegaraan, antara lain dilihat dari aspek pengetahuan, kemampuan, sikap. Hal ini sejalan dengan teori, bahwa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, kompetensi dasar, atau sering

disebut kompetensi minimal, yang akan ditransformasikan dan ditransmisikan pada peserta didik terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- 1). Kompetensi pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*), yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan materi inti Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*), yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani.
- 2). Kompetensi keterampilan kewargaan (*civic skills*), yaitu kemampuan dan kecakapan mengartikulasikan keterampilan kewargaan seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan.
- 3). Kompetensi sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara antara lain komitmen akan kesetaraan gender, toleransi, kemajemukan, dan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM.

Jadi, menurut Hermiyati yang menjadi kemas dalam pembelajaran pendidikan politik adalah standar isi yang merupakan analisis dari kurikulum. Hanya, pandangan Hermiyati terhadap kemas dalam pembelajaran pendidikan politik itu berbeda. Hermiyati memiliki pandangan yang lebih spesifik terhadap kemas pembelajaran pendidikan politik, berdasarkan analisis kompetensi dasarnya, karena dalam standar isi, guru

lebih bisa melakukan penilaian terhadap kompetensi yang dimiliki mereka. Materi-materi yang ada dalam standar isi sudah disesuaikan dengan kompetensi peserta didik. Dalam pandangan Hermiyati, bahwa kemas pembelajaran pendidikan politik hanya terletak pada kegiatan pembelajaran secara formal, bukan non formal. Ia memandang bahwa kompetensi siswa dapat dilihat dari segi pembelajaran formal saja. Padahal, dalam kurikulum yang diprogramkan adalah kurikuler formal dan kurikuler non formal yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing.

**4. Bentuk / Implementasi Pembelajaran Pendidikan Politik pada Sekolah Menengah Atas kota Pangkalpinang**

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwa bentuk / implementasi pembelajaran pendidikan politik adalah pada Pendidikan formal dan pendidikan non formal.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana untuk terjadinya pembelajaran pendidikan politik, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan sosialisasi politik secara eksplisit menanamkan nilai-nilai demokrasi yang dikaji melalui materi-materi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan politik secara formal dalam dunia persekolahan. Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan sendiri adalah mengembangkan potensi individu warga negara, dengan demikian maka seorang guru PKn haruslah menjadi guru yang berkualitas dan profesional, sebab jika guru tidak berkualitas tentu tujuan PKn itu sendiri tidak tercapai. Hal ini terdapat



dalam analisis tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang terdapat dalam hasil dokumen, yaitu: siswa dapat berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, siswa dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, bernegara, serta anti-korupsi, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat, serta siswa dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam persatuan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan politik, yaitu Peningkatan pemahaman akan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan mampu meningkatkan partisipasi secara aktif untuk membangun bangsa sesuai dengan arah dan cita-cita bangsa. Pandangan di atas, sejalan dengan Sumantri dan Affandi (1996:126), yang menyatakan bahwa:

Maksud diselenggarakan pendidikan politik pada dasarnya adalah untuk memberikan pedoman bagi generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan arah dan cita-cita bangsa Indonesia.

Pendidikan politik berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Ini berarti bahwa pendidikan politik menekankan kepada usaha pemahaman tentang nilai-nilai yang etis normatif, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan

mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara (Sumantri, 2003: 3.3).

Pendidikan formal dalam hal ini adalah pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan sosialisasi politik secara eksplisit di persekolahan. Hal ini sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 yang antara lain mewajibkan isi kurikulum wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan yang pada prinsipnya bertujuan membentuk *good citizenship* dan menyiapkan warga negara untuk masa depan. Dalam pendidikan formal, proses demokratisasi harus dimulai dari tahap yang paling awal yaitu pemberian kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan politik sebagai bagian dari sosialisasi politik dilakukan melalui agen-agen seperti keluarga, masyarakat, teman sebaya, dan tentunya bisa juga lewat sekolah sebagai lembaga formal. Pendidikan politik lewat sekolah dilakukan melalui mata pelajaran di sekolah dan salah satu yang paling penting adalah Pendidikan Kewarganegaraan.

Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman

politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa (Hidayat dan Azra, 2008: 5).

Pendidikan Kewarganegaraan dikemas dalam sebuah kurikulum dengan tujuan membentuk warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan kurikulum 2006 (KTSP), kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (dalam permendiknas no 22 tahun 2006 tentang SI).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai pendidikan politik adalah sosialisasi politik secara eksplisit yang merupakan proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik yang ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada melalui program kurikuler formal. Hal ini sejalan dengan Cholisin, 2000: 6.24, yakni PKn sebagai pendidikan politik di sekolah, maka konsekuensinya akan mengutamakan tipe sistem politik

langsung. Isi sosialisasi mengutamakan orientasi politik yang bersifat eksplisit, yang kemudian diprogram sebagaimana yang tercermin dalam kurikulum, pola belajar politik bersifat terbuka, rasional, dan arahnya untuk mewujudkan warga negara yang baik.

Dari penjelasan tentang tipe sosialisasi politik di atas, maka jelaslah bahwa pembelajaran PKn merupakan tipe sosialisai politik langsung. Karena dalam penerapannya, pembelajaran PKn mengajarkan materi yang mencakup tentang hubungan antara negara dengan warga negara serta pengenalan berbagai aktivitas politik yang dilakukan oleh aktor politik. Pembelajaran PKn juga lebih bersifat interdisipliner (berbagai bidang; ekonomi, sosial, budaya, dll).

Selain melalui Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan formal, realisasi pendidikan politik dialami juga melalui organisasi yang merupakan program kurikulum dari sekolah, yakni melalui kegiatan organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler-ekstrakurikuler. Organisasi OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) yang menjadi program kurikuler non formal di sekolah. Organisasi merupakan lembaga non formal yang dapat merealisasikan bentuk pembelajaran pendidikan politik bagi siswa di sekolah. Organisasi OSIS ini bertujuan mendidik siswa-siswa dengan menanamkan nilai-nilai demokratis dalam mengelola dan menjalankan sebuah tujuan dalam suatu organisasi sebagai bentuk realisasi penggunaan hak dan kewajiban bagi generasi muda atau pun pelajar dalam kehidupan pendidikan. Selain itu, OSIS memiliki fungsi sebagai wadah untuk

menampung seluruh aspirasi warga sekolah untuk ditindak lanjuti, baik itu sebagai saran untuk pelaksanaan organisasi maupun sebagai program kegiatan di sekolah untuk diselenggarakan dengan baik.

Selain itu, OSIS berfungsi sebagai motivator bagi sekolah. Dalam hal ini adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. OSIS juga dapat berfungsi sebagai menggerakkan sumber daya yang ada dan secara eksternal OSIS mampu beradaptasi dengan lingkungan, seperti menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa dan sebagainya.

Hal ini sejalan dengan Pembinaan dan pengembangan generasi muda dalam pengembangan pendidikan politik dapat dilakukan melalui organisasi pemuda. Dalam persekolahan dapat dilakukan melalui OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Di dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 226/C/Kep/0/1993 disebutkan bahwa Organisasi yang ada dalam lingkup pendidikan dasar dan menengah adalah OSIS. Jadi, yang dimaksud dengan OSIS adalah satu-satunya organisasi kesiswaan yang sah di sekolah yang digunakan sebagai sarana pembinaan kesiswaan.

Sebagai sarana pembinaan kesiswaan dan atau generasi muda terutama dalam rangka pendidikan politik, OSIS harus dapat berperan sebagai:

1. Peranan sebagai wadah

OSIS merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mencapai pembinaan kesiswaan pada khususnya dan tujuan pembinaan generasi muda pada umumnya. Dalam konteks ini OSIS harus mampu berfungsi sebagai wadah, wahana dan tempat pembinaan kesiswaan lainnya sehingga siswa mampu mengembangkan bakat, kreativitas, serta minat yang dimilikinya.

## 2. Peranan sebagai penggerak motivator

Motivator merupakan rangsangan atau stimulus yang menyebabkan siswa memiliki keinginan, semangat untuk melakukan kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan yang positif, OSIS akan tampil sebagai penggerak apabila para pembina mampu membawa OSIS untuk selalu dapat menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan yaitu mampu menghadapi perubahan, memiliki daya tangkal terhadap ancaman memanfaatkan peluang dan perubahan serta dapat emberikan kepuasan kepada anggotanya.

## 3. Peran yang bersifat preventif

Dalam konteks ini peranan OSIS harus dapat menyelesaikan berbagai perilaku menyimpang siswa. Dengan demikian secara preventif OSIS harus berpartisipasi dalam menanggulangi segala ancaman yang dapat mengganggu ketahanan sekolah (Sumantri, 2003: 7.11-7.12).



Selain dari organisasi OSIS, ada juga lembaga non formal lainnya yang merupakan realisasi dari pembelajaran pendidikan politik adalah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi program kurikuler non formal di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan ekstra yang diselenggarakan oleh sekolah untuk diikuti oleh masing-masing siswa sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Kegiatan ekstrakurikuler ini adalah sebagai bentuk organisasi politik yang dapat mendukung bagi terbentuknya pembelajaran pendidikan politik di sekolah.

Hal tersebut sejalan dengan Brownhill, 1989 bahwa pengajaran merupakan sesuatu yang menyangkut pemberian informasi dan keahlian (keterampilan). Para pendidik politik harus menentukan berbagai pengetahuan yang sesuai bagi pendidikan politik dan berbagai macam keahlian yang diperlukan untuk diberikan sebagai pegangan jika seorang peserta didik diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara sukses dalam politik. politik bukan hanya menyangkut tentang kekuatan saja, tetapi juga menyangkut tentang nilai-nilai, bukan hanya dalam meraih beberapa tujuan nilai tertentu tapi juga dalam meraihnya dengan cara menghormati martabat manusia. Bagi para pendidik politik, salah satu cara dalam mengambil keputusan yaitu dengan menganggap bahwa pengetahuan yang mendidik seseorang secara politik dibutuhkan untuk meraih kesempatan dalam melaksanakannya dengan penuh keberhasilan dalam sebuah konteks politik. pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan seseorang dalam suatu organisasi agar dapat meraih suatu kesempatan sukses. Seseorang yang

juga perlu dilibatkan dalam politik-politik (politik konsensus) dari politik konflik dan terkadang ahli dalam menggerakkan orang dalam direksi-direksi tertentu, dalam hal ini disebut sebagai individu yang melek politik (Brownhill, 1989).

Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ekstrakurikuler ini adalah memperluas dan mempertajam pengetahuan siswa tentang program ekskul serta berkaitan dengan mata pelajaran, menumbuhkembangkan berbagai macam nilai kepribadian bangsa dan agama sehingga terbentuk manusia yang berwatak, beriman dan berakhlak mulia, membina bakat dan minat siswa sehingga melahirkan manusia yang terampil dan percaya diri dan mandiri. Kegiatan – kegiatannya adalah LCC (Lomba Cerdas Cermat), Jurnalistik Rohis, Karya Ilmiah Remaja, olimpiade ekonomi, Palang Merah Indonesia (PMI), English Club, Japan Club, Pramuka, dan Tari tradisional,

LCC (Lomba Cerdas Cermat) UUD 1945 adalah program ekstrakurikuler yang dikembangkan dengan tujuan siswa menjadi lebih paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. dan dapat membagi pengetahuan yang telah didapat dalam kegiatan ini kepada siswa yang lain. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pendidikan politik. Kegiatan dimulai bulan Oktober 2010 sampai dengan Juni 2011, diawali dengan sosialisasi TIM cerdas cermat, kemudian dilakukan seleksi sebanyak 3 (tiga) kali guna memilih 10 (sepuluh) orang anggota Tim yang akan dipersiapkan mengikuti Lomba Cerdas Cermat. Latihan dilaksanakan setiap sabtu mulai pukul 09.00

Wib sampai selesai, dan dipadatkan jadwalnya bila akan menghadapi perlombaan.

Jurnalistik Rohis, adalah program ekstrakurikuler yang dikembangkan dari mata pelajaran agama sebagai pengembangan karakter siswa di bidang jurnalistik atau pers layaknya seorang wartawan yang bekerja di sebuah media massa. Tujuannya adalah agar siswa lebih memahami apa yang menjadi kajian untuk dapat diangkat sebagai informasi yang up to date, dan mengetahui batasan-batasan antara informasi yang layak untuk dipublikasikan dan yang tidak layak untuk dipublikasikan. Hal ini menanamkan nilai-nilai demokratis pada siswa untuk dapat berpartisipasi dalam penggunaan hak dan kewajibannya secara bebas dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pengembangan yang dilakukan ditempuh melalui pola pendidikan dan interaksi / pelibatan langsung. Adapun media yang digunakan adalah ormas/OKP disamping sekolah. Pembinaan ini dilaksanakan untuk mencapai target: memberikan wawasan berbangsa dan bernegara, membentuk sikap positif, kritis, inovatif, dan demokratis, serta mempersiapkan calon pemimpin bangsa demi masa depan. Kepeloporan generasi muda merupakan potensi internal yang harus digerakkan dan termanifestasi dari serangkaian aktivitas organisasi (Sumantri, 2003: 1.15).

Karya Ilmiah Remaja (KIR), adalah program ekstrakurikuler yang dikembangkan dari mata pelajaran ilmu alam, dimana siswa dalam

kegiatan ini melakukan suatu temuan atau eksperimen terhadap ilmu-ilmu alam. Kegiatan ini biasanya dilombakan dengan sekolah-sekolah lain.

Palang Merah Indonesia (PMI), adalah program ekstrakurikuler yang dikembangkan dengan tujuan agar siswa dapat berpartisipasi dalam hal kegiatan kemanusiaan untuk membantu menggalakkan bantuan kepada yang membutuhkan. Biasanya dilakukan dengan sosialisasi-sosialisasi kepada siswa-siswa yang ingin berpartisipasi dalam mendonorkan darahnya.

Pramuka, adalah program ekstrakurikuler yang dikembangkan dengan tujuan mengajarkan kepada para siswa bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa di andalkan oleh para bawahannya, selain itu juga kegiatan pramuka mengajarkan para siswa untuk disiplin terhadap waktu, prilaku, dan konsistensi.

Selain kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di atas, ada satu kegiatan tambahan yang diprogramkan di SMA Negeri 1 Pangkalpinang, yakni kegiatan *coffe morning*, kegiatan yang dilakukan oleh pihak siswa dan pihak guru sebagai kegiatan sosialisasi terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi selama melakukan aktivitas belajar mengajar. Kegiatan *coffe morning* ini dilakukan setiap hari senin pagi setelah upacara bendera sebagai forum komunikasi siswa dan guru untuk menjadi bahan kajian dan apabila ditemukan masalah, maka akan diselesaikan secara bersama-sama secara kekeluargaan.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan sekolah telah merealisasikan bagian dari esensi pendidikan politik yang membentuk budaya demokrasi sebagai bentuk partisipasi baik guru maupun siswa. Adanya kegiatan interaksi dan reaksi-reaksi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut melalui sarana organisasi dan ekstrakurikuler.

Dari 13 informan, ternyata yang berpandangan tentang realisasi pembelajaran pendidikan politik melalui Pendidikan Kewarganegaraan ada 3 informan, sedangkan yang menyatakan bahwa realisasi pendidikan politik melalui OSIS ada 13 informan, dan yang menyatakan realisasi pembelajaran pendidikan politik pada kegiatan ekstrakurikuler ada 5 informan.

Dalam hal ini, Deka menyatakan bahwa:

“Pembelajaran pendidikan politik yang dilakukan di Sekolah Menengah Atas pertama kali direalisasikan pastinya dalam Pendidikan Kewarganegaraan”.

Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Wiwik, bahwa:

”Realisasi pembelajaran pendidikan politik di sekolah ada pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Di dalamnya kan mengajarkan kajian-kajian pendidikan politik, juga sejalan dengan analisis tujuan Pendidikan Kewarganegaraan”.

Pandangan ini juga dinyatakan sama oleh Hery, bahwa:

“Realisasi pembelajaran pendidikan politik menurut saya adalah melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan formal dalam sekolah. Pendidikan Kewarganegaraan kan membahas masalah bagaimana siswa bisa berpartisipasi dalam dunia politik sebagai kajian pendidikan politik”.

Jadi, berdasarkan beberapa pandangan di atas, Deka, Wiwik, dan Hery menyatakan bahwa realisasi pembelajaran pendidikan politik dilakukan pertama kali melalui pendidikan formal.

**Tabel 4.5**  
**Bentuk / Implementasi Pembelajaran Pendidikan Politik**

No	Pendidikan Formal	Organisasi & Ekstrakurikuler	Keterangan
1.	Deka	Desi	Semua responden menyatakan bahwa bentuk / implementasi pembelajaran pendidikan politik adalah pada pelajaran PKn, namun ada juga yang menambahkan bahwa implementasi pembelajaran pendidikan politik tidak hanya dilakukan di pendidikan formal, tetapi yang lebih utama adalah pada bentuk keorganisasian sebagai penanaman nilai-nilai kepada peserta didik untuk dapat membentuk diri menjadi warga negara yang baik dan
2.		Wiwik	
3.		Hermiyati	
4.		Deka	
5.		Fatia	
6.		Bunaya	
7.		Viola	
8.		Fraya	
9.		Indah	
10.		Reza	
11.		Hery	
12.		Ginta	
13.		Marshinta	



			bertanggung jawab dalam penggunaan hak dan kewajiban.
--	--	--	---

#### 4.1 Bentuk / Implementasi Melalui Pendidikan Formal

Menurut pandangan 3 informan, yaitu Deka, Wiwik, dan Hery, mereka menyatakan bahwa realisasi pembelajaran pendidikan politik pertama kali didapatkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. hasil wawancara terhadap Deka, Wiwik, dan Hery adalah:

Dalam hal ini, Deka menyatakan bahwa:

“Pembelajaran pendidikan politik yang dilakukan di Sekolah Menengah Atas pertama kali direalisasikan pastinya dalam Pendidikan Kewarganegaraan”.

Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Wiwik, bahwa:

”Realisasi pembelajaran pendidikan politik di sekolah ada pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Di dalamnya kan mengajarkan kajian-kajian pendidikan politik, juga sejalan dengan analisis tujuan Pendidikan Kewarganegaraan”.

Pandangan ini juga dinyatakan sama oleh Hery, bahwa:

“Realisasi pembelajaran pendidikan politik menurut saya adalah melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan formal dalam sekolah. Pendidikan Kewarganegaraan kan membahas masalah bagaimana siswa bisa berpartisipasi dalam dunia politik sebagai kajian pendidikan politik”.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa untuk dapat berpartisipasi dalam menggunakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab berdasarkan nilai demokrasi. Hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Sudjatmiko, 2008: 12).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan pendidikan politik secara formal. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa dalam pendidikan formal, proses demokratisasi harus dimulai dari tahap yang paling awal yaitu pemberian kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan politik lewat sekolah dilakukan melalui mata pelajaran di sekolah dan salah satu yang paling penting adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa (Hidayat dan Azra, 2008: 5).

PKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan membentuk karakteristik warga negara dalam hal terutama membangun bangsa dan negara dengan mengandalkan pengetahuan dan kemampuan dasar dari pembelajaran PKn dengan materi pokoknya demokrasi politik atau peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pendidikan formal, proses demokratisasi harus dimulai dari tahap yang paling awal yaitu pemberian kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk

memperoleh pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru berorientasi pada terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*), dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan, agar mampu berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses sosialisasi politik secara eksplisit yang dikaji dalam pembelajaran dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang baik sesuai dengan kajian materi yang akan disampaikan. Pendidikan politik salah satu sarana pembinaan warga negara, terutama generasi mudanya dalam rangka mempersiapkan regenerasi menyongsong hari depan bangsa yang lebih baik. Pendidikan Kewarganegaraan diprogramkan melalui kurikulum yang mengkaji nilai-nilai yang terdapat dalam tujuan pendidikan politik, yaitu mengembangkan karakter warga negara melalui materi-materi Pendidikan Kewarganegaraan.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai sosialisasi politik langsung, siswa dapat secara eksplisit mempelajari pendidikan politik yang terangkum dalam materi-materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Materi-materinya mencakup pembelajaran dari kelas X, XI, dan XII. Materi – materinya terangkum dalam analisis kurikulum. Sejalan dengan kerangka teori, bahwa PKn sebagai pendidikan politik di sekolah, maka konsekuensinya akan mengutamakan tipe sistem politik langsung. Isi sosialisasi mengutamakan orientasi politik yang bersifat

eksplisit, yang kemudian diprogram sebagaimana yang tercermin dalam kurikulum, pola belajar politik bersifat terbuka, rasional, dan arahnya untuk mewujudkan warga negara yang baik. Metode belajar politik yang lain yang termasuk tipe sosialisasi politik langsung, seperti: imitasi, sosialisasi antisipatori, dan pengalaman politik dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran politik melalui PKn. Begitu pula tipe sosialisasi politik tak langsung, seperti transfer interpersonal, magang dan generalisasi, dapat dimanfaatkan untuk menunjang PKn. (Cholisin, 2000: 6.24)

Oleh karena itu, fungsi pendidikan politik adalah rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan warga negara guna menunjang keutuhan negara sebagai budaya bangsa. Pengembangan yang dilakukan ditempuh melalui pola pendidikan dan interaksi / pelibatan langsung. Hal ini dilakukan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan formal. Hal ini sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 yang antara lain mewajibkan isi kurikulum wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan yang pada prinsipnya bertujuan membentuk *good citizenship* dan menyiapkan warga negara untuk masa depan. Dalam pendidikan formal, proses demokratisasi harus dimulai dari tahap yang paling awal yaitu pemberian kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan politik sebagai bagian dari sosialisasi politik dilakukan melalui agen-agen seperti keluarga, masyarakat, teman sebaya, dan tentunya bisa juga lewat sekolah sebagai lembaga formal. Pendidikan politik lewat sekolah dilakukan melalui mata

pelajaran di sekolah dan salah satu yang paling penting adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penting ketika pemerintah menetapkan PKn menjadi salah satu mata pelajaran yang diwajibkan untuk dimuat dalam kurikulum sekolah.

Berdasarkan pandangan di atas dapat dinyatakan bahwa realisasi pembelajaran pendidikan politik secara eksplisit melalui pendidikan formal ada pada Pendidikan Kewarganegaraan.

#### **4.2 Bentuk / Implementasi Melalui Organisasi dan Ekstrakurikuler**

Berdasarkan hasil penelitian, semua informan menyatakan bahwa realisasi pembelajaran pendidikan politik adalah melalui sarana organisasi yang dibentuk dalam suatu Institusional sebagai wadah bagi para siswa untuk bergerak sebagaimana tujuan dari pendidikan politik, yaitu mendidik dan membina generasi muda untuk dapat ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik dalam hal ini penggunaan hak dan kewajiban yang sejalan dengan landasan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, melalui wadah tersebut, diharapkan dapat menghasilkan suatu generasi muda yang cerdas dan dewasa dalam pembentukan karakter warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Hal tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyebutkan tujuan pendidikan politik adalah sebagai berikut:

Untuk menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia yang

seutuhnya yang perwujudannya akan terlihat dalam perilaku hidup bermasyarakat sebagai berikut:

- 1). Sadar akan hak dan kewajibannya serta tanggung jawab sebagai warga negara terhadap kepentingan bangsa dan negara.
- 2). Sadar dan taat pada hukum dan semua peraturan perundangan yang berlaku.
- 3). Memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan objektif bangsa saat ini.
- 4). Memiliki disiplin pribadi, sosial, dan nasional.
- 5). Mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.
- 6). Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan bangsa dan bernegara khususnya dalam usaha pembangunan nasional.
- 7). Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa.
- 8). Sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam sekitar secara selaras, serasi, dan seimbang.
- 9). Mampu melakukan penilaian terhadap gagasan, nilai, serta ancaman yang bersumber dari ideologi lain di luar Pancasila dan UUD 1945 atas dasar pola pikir dan penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD 1945.

Dalam hal ini, pendidikan politik di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kehidupan berbangsa dan



bernegara sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Peningkatan pemahaman akan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan mampu meningkatkan partisipasi secara aktif untuk membangun bangsa sesuai dengan arah dan cita-cita bangsa. Pandangan di atas, sejalan dengan Sumantri dan Affandi (1996:126), yang menyatakan bahwa:

Maksud diselenggarakan pendidikan politik pada dasarnya adalah untuk memberikan pedoman bagi generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan arah dan cita-cita bangsa Indonesia.

Namun, berdasarkan pernyataan 5 responden, Indah, Fatia, Viola, Bunaya, dan Wiwik bahwa realisasi pembelajaran pendidikan politik adalah melalui kegiatan – kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan , diluar struktur program pendidikan formal yang merupakan kegiatan pilihan. Kegiatan ini dilakukan di luar jam pelajaran di kelas.

Melalui kegiatan ekstrakurikuler-ekstrakurikuler siswa dapat mengembangkan bakat dan minatnya berdasarkan kemampuan siswa masing-masing, berdasarkan kriteria pilihan kegiatan yang ada. Kegiatan-kegiatannya adalah OSIS, MPK, dan melalui kegiatan ekstrakurikuler-ekstrakurikuler yang ada pada program sekolah, antara lain pramuka, LCC (Lomba Cerdas Cermat) UUD 1945, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Jurnalistik Rohis, olimpiade ekonomi, Palang Merah Indonesia (PMI), English Club, Japan Club, Pramuka, dan Tari tradisional.

Kegiatan organisasi OSIS, adalah kegiatan suatu wadah dimana siswa dapat menuangkan semua aspirasinya melalui jalur organisasi OSIS ini, baik dalam bentuk saran atau pun untuk penyelenggaraan suatu kegiatan dalam sekolah. Di sekolah, OSIS rutin melakukan orasi dalam menggalakkan suara warga sekolah untuk menjadi sebuah saran dan solusi bagi OSIS dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi OSIS untuk dipecahkan bersama-sama dengan warga sekolah lainnya secara kekeluargaan dengan menampung saran-saran serta solusi-solusi yang dapat menjadi sarana menyelesaikan masalah sesuai kesepakatan bersama. Dalam hal ini, siswa terlatih untuk menyalurkan aspirasinya sebagai hak suara dalam lingkungan sekolah secara bebas dan bertanggung jawab.

Selain orasi OSIS, dilakukan juga sosialisasi sistem politik oleh OSIS melalui kegiatan pemilihan ketua dan anggota OSIS sebagai sarana partisipasi siswa dalam menyalurkan hak suara mereka untuk menentukan pemimpin mereka dalam wilayah persekolahan sebagai wadah aspirasi mereka. Layaknya anggota DPR dalam suatu sistem pemerintahan. Jadi, dalam hal ini OSIS merupakan bentuk pembelajaran pendidikan politik dalam kurikulum non formal.

Selain itu, ada kegiatan ekstrakurikuler-ekstrakurikuler sebagai kegiatan kurikulum non formal. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan non formal yang merupakan program sekolah di luar pendidikan formal. Ini ditunjukkan dari kegiatan-kegiatan tersebut memiliki nilai-nilai yang dapat menjadikan siswa lebih aktif dan partisipatif dalam

mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Hal ini sejalan dengan Sosialisasi politik memperlihatkan interaksi dan interdependensi perilaku sosial dan perilaku politik. Sebagai akibat wajar yang penting dari interaksi dan interdependensinya, ia menunjukkan interdependensi dari ilmu-ilmu sosial pada umumnya, sosiologi, dan ilmu politik pada khususnya (Rush & Althoff, 2007: 25-26).

Dalam hal ini, siswa dibebaskan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler mana saja yang mereka minati. Dari sinilah siswa belajar untuk memberikan keputusan apa yang menjadi pilihan bagi mereka sebagai proses pembentukan karakter siswa yang sejalan dengan tujuan pendidikan politik. Hal ini ditegaskan dalam teori Sherman, 1987:7 (dalam Affandi, 2011: 32 dengan beranggapan bahwa manusia secara kuat dipengaruhi oleh proses sosialisasi dan paksaan dari luar. Namun bagaimanapun tak diragukan lagi bahwa mereka mempunyai kapasitas untuk memilih di antara berbagai alternatif dan bahkan untuk mengubah keadaan di sekitarnya.

Dalam hal ini, dapat menciptakan dan mengembangkan karakter siswa untuk dapat berpartisipasi dalam menyikapi situasi dan kondisi yang mereka alami ketika melakukan kegiatan di sekolah sebagai terwujudnya budaya demokrasi.

Dari analisis beberapa pandangan di atas dapat dinyatakan bahwa realisasi pembelajaran pendidikan politik adalah melalui pendidikan non formal.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Pada bagian pembahasan ini, peneliti akan memaparkan hasil kajian terhadap data temuan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang peneliti temukan di lapangan, yang selanjutnya dianalisis dan dikomparasikan dengan berbagai konsep dan teori yang menjadi landasan pustaka dalam penelitian ini serta konsep dan teori lain yang relevan dengan hasil penelitian. Berikut akan disajikan berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian, yakni:

#### **1. Makna Pendidikan Politik pada Sekolah Menengah Atas kota Pangkalpinang**

Pendidikan politik adalah proses mendidik siswa secara terus menerus, dari generasi ke generasi sebagai pembelajaran yang bersifat kontinyu oleh generasi muda, sehingga menghasilkan bentuk-bentuk partisipasi seseorang dalam menggunakan hak dan kewajibannya dalam melakukan interaksi dan menimbulkan reaksi dalam kehidupan sosial, dengan tujuan penanaman kesadaran politik bagi generasi muda. Sebagaimana (Kartini K, 2009: 65), pendidikan politik merupakan aktivitas pendidikan diri (mendidik dengan sengaja diri sendiri) yang terus menerus berproses di dalam person, sehingga orang yang bersangkutan lebih mampu memahami dirinya sendiri dan situasi-kondisi lingkungan sekitarnya.

Pendidikan politik memiliki fungsi membina siswa agar menjadi warga negara yang baik, dalam hal ini dalam menggunakan hak dan

kewajiban mereka secara bertanggung jawab. Di sekolah, anak banyak belajar pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku politik secara eksplisit, terutama melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Melalui mata pelajaran PKn, anak diajarkan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, sistem politik, otonomi daerah, partai politik, budaya politik, dsb. Melalui pelajaran ini, anak diharapkan pada gilirannya dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan negaranya. Sejalan dengan teori Affandi (1996:25) menyatakan pendidikan politik '*political education*' sering kali menggunakan berbagai peristilahan lain seperti '*political socialization* dan *citizenship training*'. Rusadi Kantaprawira (1988:54) memandang pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Dalam perspektif ini, pendidikan politik merupakan metode untuk melibatkan rakyat dalam sistem politik melalui partisipasinya dalam menyalurkan tuntutan dan dukungannya.

Dalam hal ini, pendidikan politik di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Peningkatan pemahaman akan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan mampu meningkatkan partisipasi secara aktif untuk membangun bangsa sesuai dengan arah dan cita-cita bangsa. Pandangan di atas, sejalan dengan Sumantri dan Affandi (1996:126), yang menyatakan bahwa:

Maksud diselenggarakan pendidikan politik pada dasarnya adalah untuk memberikan pedoman bagi generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan arah dan cita-cita bangsa Indonesia.

Pendidikan politik berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Ini berarti bahwa pendidikan politik menekankan kepada usaha pemahaman tentang nilai-nilai yang etis normatif, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara (Sumantri, 2003: 3).

Pendidikan politik dianggap penting oleh hampir semua masyarakat dan dianggap sebagai penentu perilaku politik seseorang. Penilaian ini didasarkan pada maksud pendidikan politik sebagai alat untuk mempertahankan sikap dan norma politik dan meneruskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui akulturasi informal maupun melalui pendidikan politik yang direncanakan untuk menunjang stabilitas sistem politik. Brownhill dan Smart (1989), menarik sebuah proposisi bahwa pendidikan politik adalah proses pendidikan untuk membina siswa agar mampu memahami, menilai, dan mengambil keputusan tentang berbagai permasalahan dengan cara-cara yang tepat dan rasional, termasuk dalam menghadapi masalah yang *bias* maupun isu yang *controversial*.



Kedudukan dan pelaksanaan pendidikan politik dikemukakan oleh Affandi (1996:6) sebagai berikut:

Pendidikan politik tidak saja akan menentukan efektivitas sebuah sistem politik karena mampu melibatkan warganya, tetapi juga memberikan corak pada kehidupan bangsa di waktu yang akan datang melalui upaya penerusan nilai-nilai politik yang dianggap relevan dengan pandangan hidup bangsa yang bersangkutan.

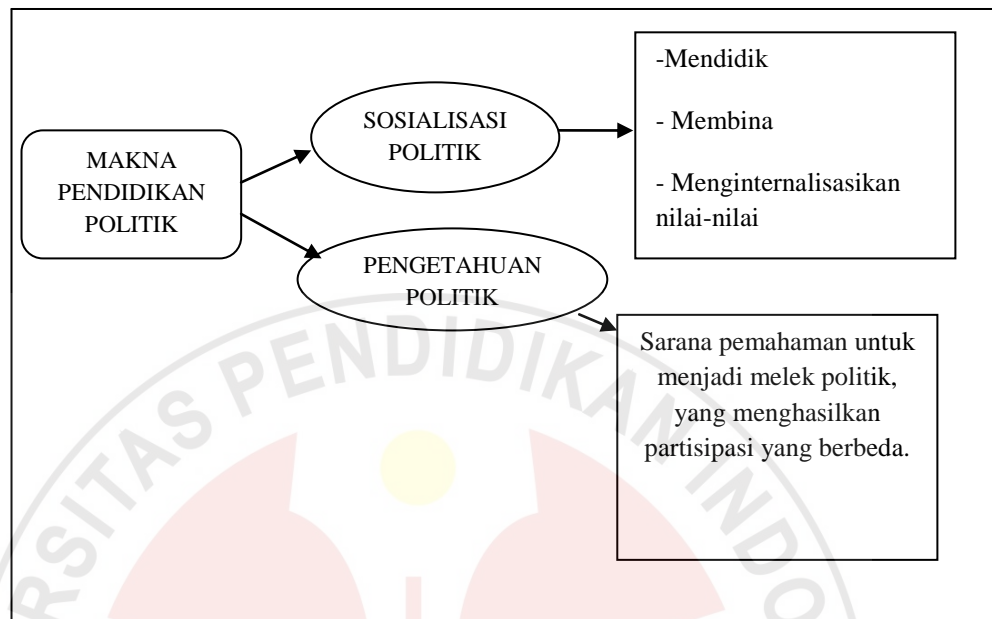
Dari penjelasan di atas, pendidikan politik memegang peranan yang sangat vital untuk mencapai kehidupan bangsa yang lebih demokratis. Dengan pendidikan politik dibentuk dan dikembangkan warga negara yang memiliki kesadaran politik dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik ditinjau dari sudut proses merupakan upaya pewarisan nilai-nilai budaya bangsa, proses peningkatan dan pengembangan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

Melalui kerangka teori di atas, maka dapat dinyatakan bahwa makna pendidikan politik dalam penelitian ini adalah sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses mendidik, menginternalisasikan, membina siswa untuk mendewasakan diri dalam berpartisipasi mengemukakan pendapat sesuai dengan hati nurani mereka dalam penggunaan hak dan kewajibannya. Sosialisasi politik adalah usaha yang sadar untuk mengubah proses realitas warga negara sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang

tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik yang ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada.

Namun, berbeda dengan responden Hermiyati dan Ginta, yang berpandangan bahwa makna pendidikan politik adalah pengetahuan politik. Pengetahuan politik di sini adalah membawa seseorang ke dalam tingkat partisipasi politik tertentu. Sejalan dengan teori Affandi, 1996: 27 bahwa pengetahuan politik akan membawa orang pada tingkat partisipasi tertentu. Dalam politik seseorang tidak hanya dituntut mengembangkan pengetahuan juga harus mengembangkan aspek sikap dan keterampilan. Perpaduan ketiga aspek tersebut menurut Crick & Porter dalam Affandi (1996:27), disebut melek politik "*political literacy*". Dari aspek pengetahuan seseorang dikatakan melek politik apabila sekurang-kurangnya menguasai tentang: (1) informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan, dari mana uang berasal, bagaimana sebuah institusi bekerja; (2) bagaimana melibatkan diri secara aktif dalam memanfaatkan pengetahuan; (3) kemampuan memprediksi secara efektif bagaimana cara memutuskan sebuah isu; (4) kemampuan mengenal tujuan kebijakan secara baik yang dapat dicapai ketika isu (masalah) telah terpecahkan; (5) kemampuan memahami pandangan orang lain dan membenahan mereka tentang tindakannya dan membenaran tindakan dirinya sendiri. Kemampuan tadi tentu saja berbeda pada setiap orang bergantung pada tingkat melek politiknya.



**Gambar 1. Konstruksi Makna Pendidikan Politik pada Sekolah Menengah Atas Kota Pangkalpinang**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat dikonstruksikan makna pendidikan politik adalah sosialisasi politik sebagai proses yang bertujuan mendidik, membina, dan menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi kepada siswa secara terus menerus (bersifat kontinyu) untuk dapat menjadi warga negara yang melek politik dalam berpartisipasi pada kehidupan politik yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi, sehingga menghasilkan partisipasi politik yang berbeda-beda pada siswa.

Namun, berbeda dengan 2 informan yang berbeda pandangan tentang makna pendidikan politik adalah sebagai pengetahuan politik. pengetahuan politik dalam hal ini adalah bagaimana seseorang memiliki partisipasi yang berbeda berdasarkan pengalaman-pengalaman politik seperti

pada sistem politik. Mereka memaknai pendidikan politik sebagai pengetahuan politik untuk menjadikan warga negara melek politik.

## **2. Kajian atau Ruang Lingkup Pembelajaran Pendidikan Politik pada Sekolah Menengah Atas kota Pangkalpinang**

Kajian atau ruang lingkup pendidikan politik adalah materi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan politik mengkaji bahasan mengenai sistem politik, partisipasi politik, budaya politik, sosialisasi politik, dan lain-lain yang berkaitan dengan kajian pendidikan politik dan berlandaskan UUD 1945.

Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyebutkan tujuan pendidikan politik adalah sebagai berikut:

Untuk menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia yang seutuhnya yang perwujudannya akan terlihat dalam perilaku hidup bermasyarakat sebagai berikut:

- 1) Sadar akan hak dan kewajibannya serta tanggung jawab sebagai warga negara terhadap kepentingan bangsa dan negara.
- 2) Sadar dan taat pada hukum dan semua peraturan perundangan yang berlaku.

- 3) Memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan objektif bangsa saat ini.
- 4) Memiliki disiplin pribadi, sosial, dan nasional.
- 5) Mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.
- 6) Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan bangsa dan bernegara khususnya dalam usaha pembangunan nasional.
- 7) Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa.
- 8) Sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam sekitar secara selaras, serasi, dan seimbang.
- 9) Mampu melakukan penilaian terhadap gagasan, nilai, serta ancaman yang bersumber dari ideologi lain di luar Pancasila dan UUD 1945 atas dasar pola pikir dan penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD 1945.

Dalam hal ini, pendidikan politik di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Peningkatan pemahaman akan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan mampu meningkatkan partisipasi secara aktif untuk membangun bangsa sesuai dengan arah dan cita-cita bangsa. Pandangan di atas, sejalan dengan Sumantri dan Affandi (1996:126), yang menyatakan bahwa:

Maksud diselenggarakan pendidikan politik pada dasarnya adalah untuk memberikan pedoman bagi generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan arah dan cita-cita bangsa Indonesia.

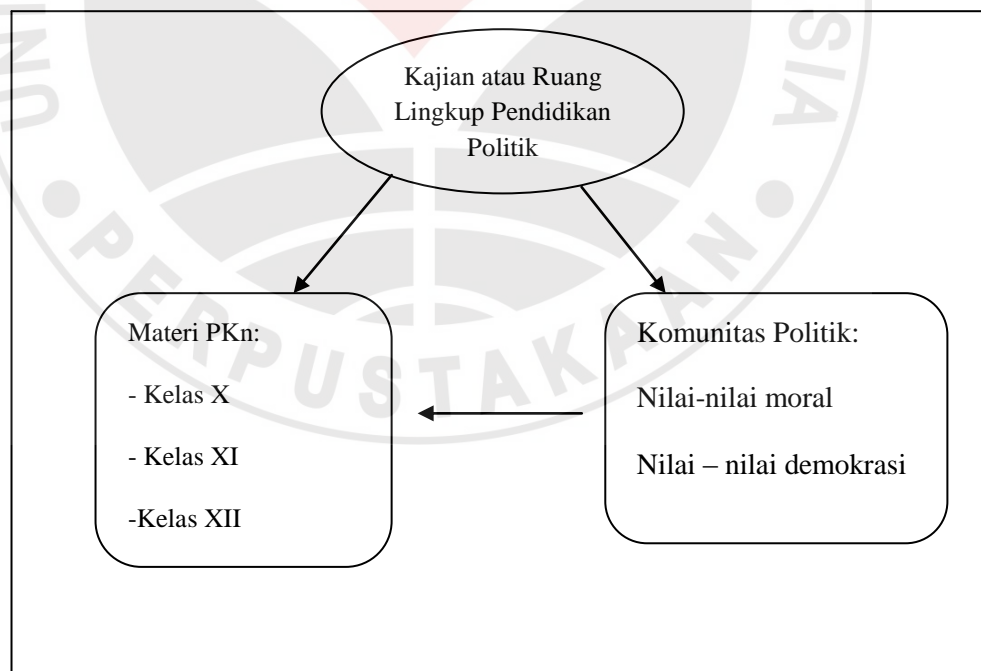
Pada era reformasi ini Pendidikan Kewarganegaraan juga sedang dalam proses reformasi ke arah Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru (*New Indonesian Civic Education*). Reformasi itu mulai dari aspek yang mendasar, yaitu reorientasi visi dan misi, revitalisasi fungsi dan peranan, hingga restrukturisasi isi kurikulum dan materi pembelajaran.

Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru berorientasi pada terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*), dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan, agar mampu berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Kedudukan warga negara yang ditempatkan pada posisi yang lemah dan pasif, seperti pada masa-masa lalu harus diubah pada posisi yang kuat dan partisipatif. Mekanisme penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis semestinya tidak bersifat *top down*, melainkan lebih bersifat *bottom up*. Untuk itulah diperlukan pemahaman yang baik dan kemampuan mengaktualisasikan demokrasi di kalangan warga negara, ini dapat dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Sunarso dkk. 2004: 3-4).

Berdasarkan pandangan Marshinta yang berbeda, yang mengatakan bahwa kajian pendidikan politik adalah komunitas politik.



Komunitas politik dalam penelitian ini dimaksudkan adalah menekankan pada pendekatan moral, demokrasi, berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini sejalan dengan teori bahwa dalam meninjau kerangka kerja suatu eksistensi pelaku politik, kita tidak harus mengikuti perkembangan negara idaman yang tak dapat dicapai, melainkan kita harus merumuskan suatu versi ideal yang sesungguhnya melalui cara yang lebih abstrak. Pendidikan politik terbatas untuk memberikan tinjauan yang berkelanjutan mengenai institusi dan kehidupan sehari-hari. Meninjau kependidikan itu sendiri mengingatkan atas apa yang kita harapkan untuk tercapai, yang juga menekankan pada pendekatan moral (Brownhill, 1989: IV).



**Gambar 2. Kajian atau Ruang Lingkup Pendidikan Politik**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat dikonstruksikan bahwa kajian atau ruang lingkup pendidikan politik adalah materi

Pendidikan Kewarganegaraan yang beresensi menanamkan nilai-nilai pengembangan karakter berdasarkan landasan Pancasila dan UUD 1945. Kajian pada mata pelajaran PKn didapat pada kelas X, XI, dan XII. Namun ada beberapa informan yang menyatakan bahwa kajian atau ruang lingkup pembelajaran pendidikan politik adalah pendidikan karakter, yang memuat nilai-nilai moral dan demokrasi.

### **3. Pembuatan Model Pembelajaran Pendidikan Politik pada Sekolah Menengah Atas kota Pangkalpinang**

Model pembelajaran pendidikan politik adalah kurikulum.

Dengan kurikulum dapat membangun sebuah desain pembelajaran dengan berpatokan pada program-program pembelajaran yang ada pada kurikulum.

Program kurikulum sebagai model pembelajaran pendidikan politik dalam penelitian ini adalah program kurikuler formal dan organisasi / kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan dari program tersebut adalah untuk mentransformasikan kepada siswa untuk menjadi warga negara yang partisipatif dalam dimensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Hal ini sejalan dengan Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, kompetensi dasar, atau sering disebut kompetensi minimal, yang akan ditransformasikan dan ditransmisikan pada peserta didik terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- 1). Kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan materi inti Pendidikan

Kewargaan (*Civic Education*), yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani.

- 2). Kompetensi keterampilan kewargaan (*civic skills*), yaitu kemampuan dan kecakapan mengartikulasikan keterampilan kewargaan seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan.
- 3). Kompetensi sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara antara lain komitmen akan kesetaraan gender, toleransi, kemajemukan, dan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM.

Ketiga kompetensi tersebut bertujuan membangun pembelajaran (*learning building*) Pendidikan Kewargaan ini yang dielaborasi melalui cara pembelajaran yang demokratis, partisipatif, dan aktif (*active learning*) sebagai upaya transfer pembelajaran (*transfer of learning*), nilai (*transfer of value*) dan prinsip-prinsip (*transfer of principles*) demokrasi dan HAM yang merupakan prasyarat utama tumbuh kembangnya masyarakat madani (Hidayat dan Azra, 2008: 8-9).

Program kurikuler formal didapatkan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sosialisasi politik langsung, terutama dalam penyampaian materi, penggunaan metode, dan penggunaan media

pembelajaran PKn yang diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi proses pembelajaran PKn dalam lapangan. Hal ini sejalan dengan jika dikaitkan dengan pembelajaran PKn, proses pembelajaran PKn ini merupakan kategori sosialisasi politik secara langsung, karena dalam kegiatan belajar mengajar pembelajaran PKn dapat secara langsung dan gamblang memperkenalkan kegiatan-kegiatan dan penyelesaian kasus-kasus politik yang real dan relevan sehingga siswa dapat dengan mudah mempelajari pembelajaran PKn tanpa harus menghafal teks dipahami dengan konsepsi yang benar, dapat disajikan dalam kegiatan belajar dengan benar, serta menarik. Guru juga dituntut untuk dapat menguasai materi yang terkandung dalam PKn. Kegiatan tersebut ditujukan untuk para penerima pesan, dalam hal ini peserta didik dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Dapat dikatakan bentuk sosialisasi politik langsung apabila seseorang menerima / mempelajari nilai-nilai informasi, sikap, pandangan-pandangan, keyakinan- keyakinan mengenai politik secara eksplisit. Misalnya, individu secara eksplisit mempelajari budaya politik, sistem politik konstitusi, partai politik, dsb (Cholisin, 2000: 8).

Pola belajar politik atau sosialisasi politik menurut teori sistem diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan sistem politik ideal yang ingin dibangun bangsanya. Bagi bangsa Indonesia sistem politik ideal yang hendak dibangun adalah sistem politik demokrasi pancasila, maka arah sosialisasi politik adalah pada sistem politik ini (Cholisin. 2000: 6.3-6.4).

PKn sebagai pendidikan politik di sekolah, maka konsekuensinya akan mengutamakan tipe sistem politik langsung. Isi sosialisasi politik mengutamakan orientasi politik yang bersifat eksplisit, yang kemudian diprogram sebagaimana yang tercermin dalam kurikulum, pola belajar politik bersifat terbuka, rasional, dan arahnya untuk mewujudkan warga negara yang baik.

Metode belajar politik yang lain yang termasuk tipe sosialisasi politik langsung, seperti: imitasi, sosialisasi antisipatori, dan pengalaman politik dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran politik melalui PKn. Begitu pula tipe sosialisasi politik tak langsung, seperti transfer interpersonal, magang dan generalisasi, dapat dimanfaatkan untuk menunjang PKn. (Cholisin, 2000: 6.24)

Dari penjelasan tentang tipe sosialisasi politik di atas, maka jelaslah bahwa pembelajaran PKn merupakan tipe sosialisai politik langsung. Karena dalam penerapannya, pembelajaran PKn mengajarkan materi yang mencakup tentang hubungan antara negara dengan warga negara serta pengenalan berbagai aktivitas politik yang dilakukan oleh aktor politik. Pembelajaran PKn juga lebih bersifat interdisipliner (berbagai bidang; ekonomi, sosial, budaya, dll) dan lebih menekankan pada dialog dari pada monolog, karena dalam hal ini warga negara dituntut untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan dalam pembelajaran PKn melalui pendidikan politik. Adapun metode yang digunakan dalam menjelaskan materi pembelajaran yang berhubungan

dengan pendidikan politik secara eksplisit/ langsung, antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan metode meniru, sosialisasi antisipatori, pendidikan politik, dan pengalaman politik. Sehingga, siswa dapat menganalisis kejadian yang dijelaskan mengenai politik/ pendidikan politik.

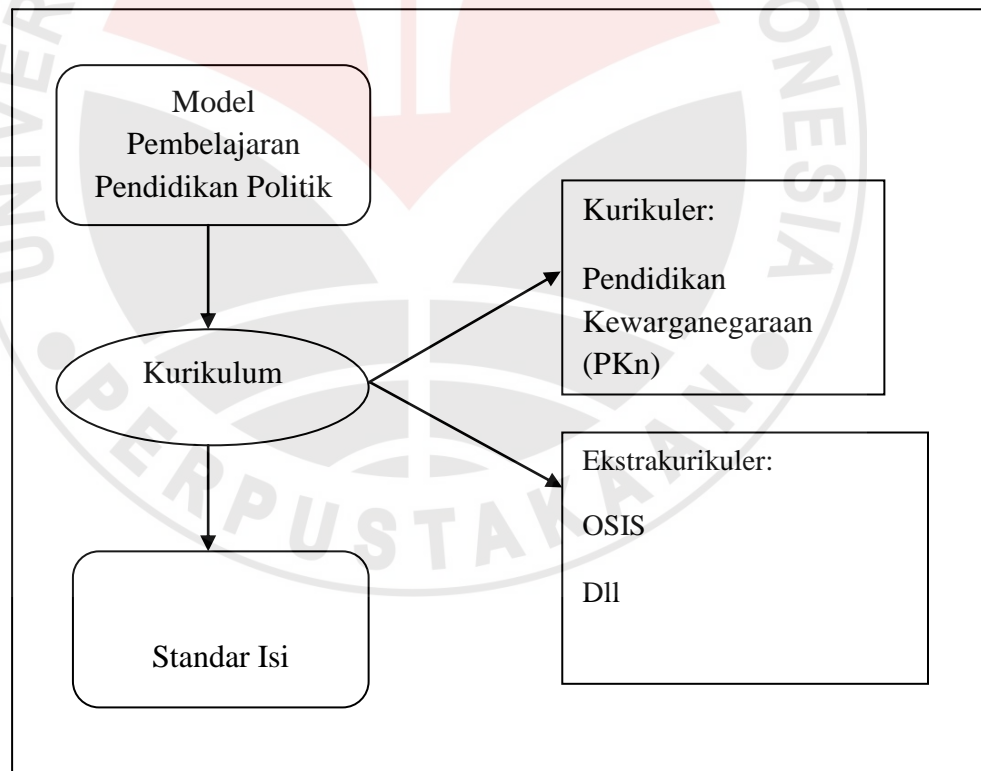
Sedangkan program kurikuler non formal dilakukan melalui kegiatan-kegiatan keorganisasian dan ekstrakurikuler-ekstrakurikuler. Sejalan dengan pendidikan politik merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana guna meningkatkan kesadaran politik warga negara sehingga ia dapat berperan sebagai pelaku dan partisipan dalam kehidupan politik kenegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai politik yang berlaku serta dapat menjalankan peranannya secara aktif, sadar dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh nilai-nilai politik yang berdasarkan ideologi nasional. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan akan mampu tercapainya stabilitas nasional yang semakin mantap dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Pembinaan dan pengembangan generasi muda dalam pengembangan pendidikan politik dapat dilakukan melalui organisasi pemuda. Dalam persekolahan dapat dilakukan melalui OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Di dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 226/C/Kep/0/1993 disebutkan bahwa Organisasi yang ada dalam lingkup pendidikan dasar dan menengah adalah OSIS. Jadi, yang dimaksud dengan OSIS adalah satu-satunya



organisasi kesiswaan yang sah di sekolah yang digunakan sebagai sarana pembinaan kesiswaan.

Namun, berbeda dengan pandangan Hermiyati yang berpendapat bahwa kemas pembelajaran pendidikan politik adalah standar isi. Dalam hal ini berupa analisis terhadap kurikulum. Hal ini berarti Hermiyati memiliki pandangan yang lebih spesifik terhadap kemas pembelajaran pendidikan politik. Jadi, dalam pandangan Hermiyati yang dimaksud kemas dalam hal ini adalah desain pembelajaran.



**Gambar 3. Model Pembelajaran Pendidikan Politik**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran pendidikan politik adalah kurikulum yang terbagi menjadi program kurikuler formal dan organisasi / kegiatan ekstrakurikuler

yang diprogramkan oleh pihak sekolah dan dikembangkan menjadi sebuah standar isi sebagai hasil analisis kurikulum untuk dilaksanakan dengan menggunakan metode dan media pembelajaran pendidikan politik.

#### **4. Bentuk / Implementasi Pembelajaran Pendidikan Politik pada Sekolah Menengah Atas kota Pangkalpinang**

Bentuk / implementasi pembelajaran pendidikan politik adalah melalui pendidikan formal (Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan) dan kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler yang diprogramkan oleh sekolah, antara lain organisasi OSIS, dan kegiatan Ekstrakurikuler.

Pendidikan formal dalam implementasi pembelajaran pendidikan politik adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan. berdasarkan analisis tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah siswa dapat berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, siswa dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, bernegara, serta anti-korupsi, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat, serta siswa dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam persatuan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Hal ini sejalan dengan teori Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan,

sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Sudjatmiko, 2008: 12).

Selain itu, pendidikan politik harus dijalankan dengan proses demokratisasi yang merupakan landasan dari Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan kajian materi dari Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan formal. Hal ini sejalan dengan Dalam pendidikan formal, proses demokratisasi harus dimulai dari tahap yang paling awal yaitu pemberian kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan politik sebagai bagian dari sosialisasi politik dilakukan melalui agen-agen seperti keluarga, masyarakat, teman sebaya, dan tentunya bisa juga lewat sekolah sebagai lembaga formal. Pendidikan politik lewat sekolah dilakukan melalui mata pelajaran di sekolah dan salah satu yang paling penting adalah Pendidikan Kewarganegaraan.

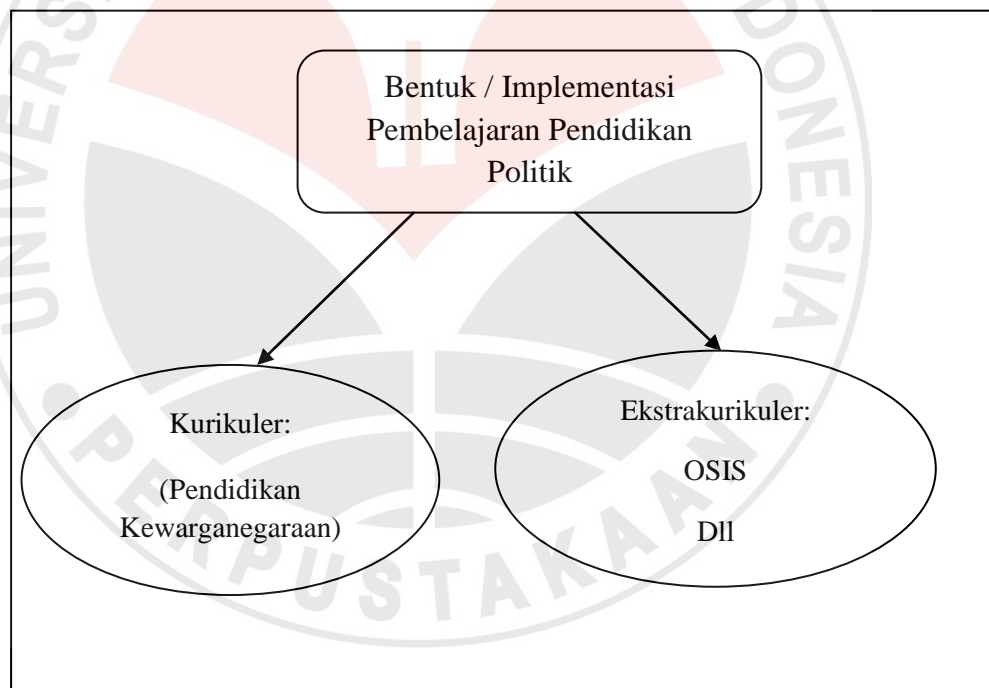
PKn sebagai pendidikan politik di sekolah adalah pendidikan formal, maka konsekuensinya akan mengutamakan tipe sistem politik langsung. Isi sosialisasi mengutamakan orientasi politik yang bersifat eksplisit, yang kemudian diprogram sebagaimana yang tercermin dalam kurikulum, pola belajar politik bersifat terbuka, rasional, dan arahnya untuk mewujudkan warga negara yang baik. Dalam hal ini adalah bagaimana memperjelas makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan politik sebagai sosialisasi politik bagi warga negara dengan tujuan

menjadikan warga negara melek politik. hal ini sejalan dengan kurikulum 2006 (KTSP), kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Selain dalam pendidikan formal, pembelajaran pendidikan politik juga direalisasikan melalui organisasi dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk kegiatan-kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah sebagai program kurikulum sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain organisasi OSIS, kegiatan ekstrakurikuler seperti, LCC (Lomba Cerdas Cermat) UUD 1945, pramuka, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Jurnalistik Rohis, olimpiade ekonomi, Palang Merah Indonesia (PMI), English Club, Japan Club, Pramuka, dan Tari tradisional.

Dalam kegiatan-kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler, pendidikan politik mengimplementasikan tujuan membentuk siswa untuk dapat belajar menentukan sikap dalam kehidupan sosialnya. Sebab, pada kegiatan-kegiatan tersebut siswa dibebaskan untuk memilih kegiatan apa yang mereka minati sebagai pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka. Hal ini sejalan dengan kemajuan dan keberhasilan pendidikan politik hanya dapat dilihat dari perubahan sikap dan tingkah laku generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemajuan ini terlihat dalam sikap dan perilaku yang mencerminkan kedewasaan

politik yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, misalnya: partisipasi dalam pemilihan umum, keikutsertaan dalam organisasi kemasyarakatan atau politik, peran serta aktif dalam pembangunan nasional, dan bentuk-bentuk perilaku lain yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Sumantri, 2003: 3.14-3.15). Kepeloporan generasi muda merupakan potensi internal yang harus digerakkan dan termanifestasi dari serangkaian aktivitas organisasi (Sumantri, 2003: 1.15).



**Gambar 4. Konstruksi Bentuk / Implementasi Pembelajaran Pendidikan Politik**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pembelajaran pendidikan politik adalah melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal dalam penelitian ini merupakan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai proses sosialisasi politik

secara eksplisit di sekolah. Sedangkan pendidikan non formal dalam penelitian ini merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal, yaitu berupa kegiatan-kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler yang terprogram di sekolah.

